

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**

**TAHUN 2017-2022**

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta

Telp. (0274) 588938, 561030 Fax (0274) 561030

Website: [www.dpkp.jogjaprov.go.id](http://www.dpkp.jogjaprov.go.id) Email: [dpkp@jogjaprov.go.id](mailto:dpkp@jogjaprov.go.id)

Kode Pos 55165



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **39** TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109

TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur sebagaimana amanat Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu merubah, mengurangi, dan

menambah Kegiatan dan Tolak Ukurnya sehingga perlu disesuaikan di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

- c. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 perlu merubah, mengurangi, dan menambah Kegiatan dan Tolak Ukurnya sehingga perlu disesuaikan di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Tahun 2017-2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perubahan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

PERUBAHAN RENSTRA-PD

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra-PD Tahun 2017-2022 dilakukan terbatas pada pengurangan, perubahan, dan

penambahan Kegiatan dan Tolak Ukurnya sesuai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah, dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019

### BAB III DOKUMEN PERUBAHAN RENSTRA-PD

#### Pasal 3

- (1) Dokumen Perubahan Renstra-PD Tahun 2017-2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dokumen Perubahan Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perubahan Renstra setiap PD dilingkungan Pemerintah Daerah yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

#### Pasal 4

Perubahan Renstra-PD yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Renja-PD.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **26** Juni 2019

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X



Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal **26** Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



GATOT SAPTADI

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR **39** TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2019  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20  
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2017-2022

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN 2017-2022

**VIII**  
**PENUTUP**

Demikian Rencana Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan DIY Tahun 2017-2022 yang akan dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Keberhasilan target pencapaian Rencana Strategis ini sangat bergantung pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya yang sungguh-sungguh dari segenap unsur di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan sendiri, serta dukungan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan segenap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mitra dan stakeholders. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini juga menjadi gambaran nyata bagi keberhasilan peningkatan kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**GUBERNUR**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**



**HAMENGKU BUWONO X**



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 disusun sebagai perwujudan amanah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3), Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur RPJMD 2012-2017, serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Rencana Strategis Perangkat Daerah 2017-2022 yang difokuskan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan perekonomian kompetitif yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas dan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pentahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Sektor pertanian masih menjadi salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDRB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Upaya pencapaian target pembangunan pertanian pada RPJMD 2017-2022 yang meliputi (1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, (2) Peningkatan Produksi Hortikultura, (3) Peningkatan Populasi Peternakan, (4) Program Peningkatan Produksi Perkebunan, (5) Pengembangan Perbenihan Pertanian, (6) Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian, (7) Perlindungan Tanaman Pertanian, (8) Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan, (9) Pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan, (10) Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan, dan (11) Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan.

Dalam lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah semakin nyata. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi tiga besar penyumbang PDRB DIY dengan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) menyumbang sebesar 8,56% pada tahun 2017\* (angka sementara) berdasarkan atas harga yang berlaku dan 7,28% berdasarkan atas harga konstan 2010. Kontribusi sektor pertanian DIY cenderung mengalami penurunan distribusi persentase PDRB rata-rata sebesar 0,22% berdasarkan atas harga yang berlaku dan 0,34% berdasarkan atas harga konstan 2010 dalam kurun waktu 2012-2017\*. Hal ini disebabkan kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, terjadi alih fungsi lahan sawah rata-rata sebesar 0,244% per tahun selama kurun waktu 2012-2017. Alih fungsi lahan terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Penurunan jumlah rumah tangga pertanian juga berdampak pada penurunan kontribusi pertanian.

Penyusunan Renstra Perubahan ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017- 2022 disusun sebagai arah dan pedoman pembangunan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta dimana pembangunan pertanian di DIY berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pangan juga berkontribusi dalam mendukung perekonomian regional di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017-2022.

Renstra Perubahan ini disusun dengan maksud sebagai acuan bagi penyusunan usulan program/kegiatan tahunan selama kurun waktu 2017-2022 guna mendukung tujuan dan sasaran program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah DIY dan memberikan hasil signifikan bagi kesejahteraan masyarakat pertanian.

Yogyakarta, 18 April 2019

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN  
KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Ir. SASONGKO, M.Si  
NIP.19591216 198603 1 007**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1-1
1.2 Landasan Hukum .....	1-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	1-5
1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan .....	1-5
1.5 Sistematika Penulisan .....	1-6
<b>BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>2-1</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	2-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	2-3
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-5
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	2-23
<b>BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>3-1</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	3-1
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	3-2
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota .....	3-4
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	3-8
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	3-11
<b>BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>4-1</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah .....	4-1
<b>BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>5-1</b>
<b>BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>6-1</b>
<b>BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>7-1</b>
<b>BAB 8 PENUTUP .....</b>	<b>8-1</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Bidang Barang .....	2-5
Tabel 2.2. PDRB Sektor Pertanian Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan .....	2-6
Tabel 2.3. PDRB Sektor Pertanian Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga yang Berlaku .....	2-6
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah DIY .....	2-7
Tabel 2.5. Target dan Capaian Urusan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di DIY Tahun 2017 .....	2-8
Tabel 2.6. Produksi Tanaman Pangan di DIY Tahun 2013-2017 .....	2-9
Tabel 2.7. Populasi Ternak DIY Tahun 2016-2017 .....	2-12
Tabel 2.8. Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Tahun 2016-2017 .....	2-13
Tabel 2.9. Nilai Tukar Petani Tahun 2016 dan 2017 .....	2-14
Tabel 2.10. Proyeksi Ketersediaan Pangan DIY Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Angka Tetap Tahun 2016 .....	2-18
Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian DIY .....	2-20
Tabel 2.12. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Ketahanan Pangan DIY .....	2-21
Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY .....	2-22
Tabel 4.1. Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran .....	4-1
Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah .....	4-2
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	5-6
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY .....	6-2
Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY .....	6-4
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	7-1

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY .....	2-3
Gambar 2.2. Produksi Padi dan Palawija Tahun 2013-2017* di DIY .....	2-9
Gambar 2.3. Produksi Padi, Jagung, dan Ubi Kayu (dalam Ton) Tahun 2013-2017* .....	2-10
Gambar 2.4. Produksi Cabai dan Bawang Merah (Ton) di DIY Tahun 2013-2017* .....	2-11
Gambar 2.5. Proporsi Produksi Hortikultura di DIY Tahun 2017* .....	2-11
Gambar 2.6. Distribusi Produksi Tanaman Perkebunan di DIY Tahun 2016-2017 .....	2-13
Gambar 2.7. Perbandingan Capaian Ketersediaan dan Konsumsi Energi Tahun 2011-2017 .....	2-15
Gambar 2.8. Perbandingan Capaian Ketersediaan dan Konsumsi Protein Tahun 2011-2017 .....	2-16
Gambar 2.9. Jumlah Desa Rawan Pangan di DIY Tahun 2011-2017 .....	2-17
Gambar 2.10. Perkembangan Luas Lahan Sawah DIY .....	2-19

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun), maupun jangka pendek (1 tahun). Dokumen RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal itu daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY untuk menyusun Rencana Strategis OPD.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, pada bagian penjelasan Pasal 42 ayat (1) mengamanatkan bahwa dalam rangka penyediaan pendanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan. Amanat ini selanjutnya dipertegas kembali di dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai perwujudan dari dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan, RPJMD DIY diamanatkan untuk memuat arah kebijakan serta program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan keistimewaan.

Rencana Strategis merupakan komponen manajemen strategis yang bertugas untuk memperjelas tujuan dan sasaran organisasi, memilih berbagai kebijakan organisasi, terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya, serta menciptakan suatu

pedoman dalam menterjemahkan kebijakan organisasi.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis sebagai penjabaran dari rencana strategis pelaksanaan arah dan kebijakan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY merupakan rujukan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas program dan kegiatan tahunan Dinas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), di samping sebagai rujukan dalam penyusunan usulan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (APBN) serta sumber-sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY merupakan dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan (2017-2022). Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi pembangunan pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilakukan dengan melibatkan seluruh pilar pelaku pembangunan yang meliputi Aparatur Pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta atau dunia usaha, serta petani/kontak tani di DIY, melalui tahap-tahap berikut (1) penyiapan konsep *draft* Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2017-2022; (2) penggalangan masukan dan perbaikan dari berbagai lapisan masyarakat pelaku pembangunan pertanian melalui *brainstorming, focus group discussion*, seminar, dan koordinasi perencanaan pembangunan pertanian tingkat kabupaten/kota dan; (3) konsultasi dengan narasumber untuk memperoleh referensi akademik dalam penyempurnaan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Dokumen Renstra ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat yang pada penyusunannya memperhatikan perencanaan pembangunan pertanian ke depan sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2017-2022 secara

menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

Mengingat peran dan fungsi Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat maka penyusunan Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 2017-2022 didasarkan pada landasan ideologis Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan landasan operasional sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Target Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan serta Indikator Kinerja Utama Gubernur RPJMD 2012-2017;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Rencana Strategis Perangkat Daerah 2017-2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY disusun dengan maksud memberikan arah Kebijakan Pembangunan Pertanian selama rentang waktu 2017-2022 dalam kerangka pencapaian Visi, Misi dan Program, serta bertujuan untuk:

1. Menentukan arah pembangunan pertanian sekaligus sebagai acuan bagi para pelaku pembangunan pertanian;
2. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
3. Menjamin komitmen pada program dan kegiatan yang sudah disepakati secara partisipatif antar semua pemangku kepentingan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan daerah;
4. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar daerah, antar pusat dan daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan.
5. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
6. Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas dan pengembangan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi awal sampai akhir pelaksanaan program.

### **1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan**

Perubahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2017-2022 dilaksanakan guna menindaklanjuti hasil musyawarah perencanaan pembangunan untuk penyusunan RKPD 2020 dimana ada beberapa kegiatan yang harus disesuaikan dalam dokumen Renstra guna mengakomodir kebutuhan perencanaan tahun 2020.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY 2017-2022 disusun menurut sistematika:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Dasar Pertimbangan Perubahan, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Menguraikan tupoksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, SDM dan sarana prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, kondisi pertanian secara umum di DIY, tantangan dan peluang yang mesti dijawab dalam pembangunan pertanian.

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Merinci sejumlah faktor penting yang sangat berperan dalam menentukan keberhasilan kinerja pembangunan pertanian di DIY, menjelaskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, menyampaikan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah, menjelaskan faktor-faktor penghambat ataupun faktor pendorong tercapainya pembangunan pertanian, penentuan isu-isu strategis.

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan merinci tujuan kualitatif dan sasaran kuantitatif yang hendak diwujudkan dalam pembangunan pertanian, menguraikan cara-cara sistematis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian, tahapan serta prioritas implementasi program dan kegiatan tahunan selama lima tahun masa pelaksanaan Rencana Strategis ini.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menjelaskan rumusan strategis dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Merinci rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target sesuai indikator kinerja yang telah direncanakan.

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menjelaskan dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

#### **2.1.1 Tugas**

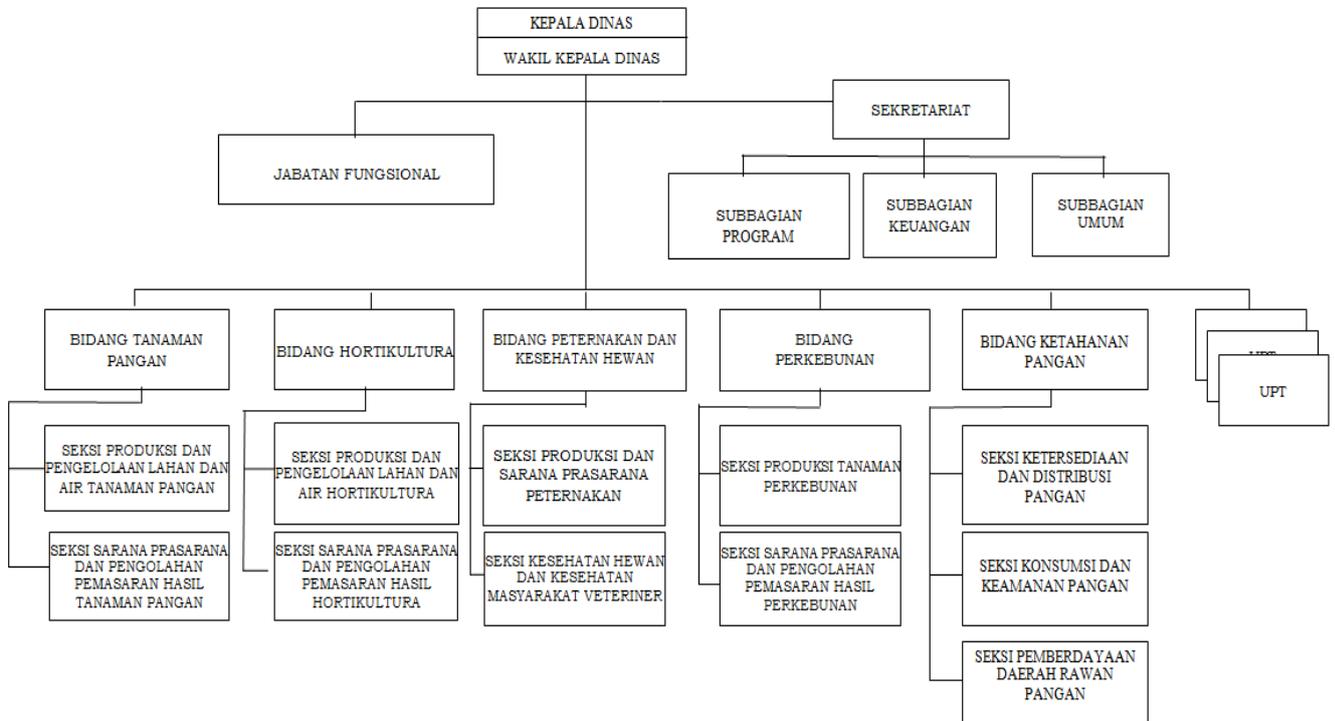
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan.

#### **2.1.2 Fungsi**

- 1) Penyusunan program kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan dan kesehatan hewan;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi dan pengembangan ketahanan pangan;
- 5) Pelaksanaan pengembangan pascapanen, pengolahan, mutu dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan serta peternakan dan kesehatan hewan;
- 6) Fasilitasi pembiayaan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
- 7) Pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan Kabupaten/Kota;
- 8) Penyelenggaraan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan lintas Kabupaten/Kota;
- 9) Pelestarian tradisi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
- 10) Pengembangan kemitraan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;

- 11) Fasilitasi, pelayanan, sertifikasi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
- 12) Fasilitasi sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
- 13) Penyelenggaraan pembinaan, sertifikasi, dan pengawasan benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 14) Penyelenggaraan perlindungan tanaman terhadap organisme pengganggu tumbuhan;
- 15) Penyelenggaraan pengujian mutu dan keamanan pangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
- 16) Penyelenggaraan produksi benih sumber tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- 17) Penyelenggaraan produksi bibit ternak dan bibit pakan ternak;
- 18) Penyelenggaraan diagnostik kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- 19) Pengembangan sumber daya manusia pertanian;
- 20) Penyelenggaraan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta ketahanan pangan;
- 21) Penyelenggaraan kelembagaan dan ketenagaan penyuluhan;
- 22) Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- 23) Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- 24) Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- 25) Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
- 26) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pertaniandan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
- 27) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.1.2 Struktur Organisasi



**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY**

*(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2018)*

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai lingkup kantor induk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (belum termasuk UPTD) pada tahun 2019 secara keseluruhan berjumlah 381 orang, sedangkan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan dan jabatan adalah sebagai berikut.

**a. Berdasarkan jenis kelamin:**

1. Laki laki	:	235 orang
2. Perempuan	:	146 orang

**b. Berdasarkan tingkat pendidikan:**

1. Doctoral (S3)	:	- orang
2. Pasca Sarjana (S2)	:	33 orang
3. Sarjana (S1)	:	172 orang
4. D-IV	:	6 orang
5. D-III/Sarmud	:	14 orang

6. D-I		4 orang
7. SLTA Sederajat	:	131 orang
8. SLTP Sederajat	:	14 orang
9. SD	:	7 orang
<b>c. Berdasarkan golongan:</b>		
1. Golongan IV	:	42 orang
2. Golongan III	:	270 orang
3. Golongan II	:	57 orang
4. Golongan I	:	12 orang
<b>d. Berdasarkan jabatan struktural:</b>		
1. Pejabat eselon II	:	2 orang
2. Pejabat eselon III	:	10 orang
3. Pejabat eselon IV	:	26 orang
<b>e. Berdasarkan unit kerja:</b>		
1. Kantor Dinas Pertanian Provinsi DIY:		
a. Sekretariat	:	31 orang
b. Bidang Tanaman Pangan	:	11 orang
c. Bidang Tanaman Hortikultura	:	11 orang
d. Bidang Perkebunan	:	12 orang
e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	:	14 orang
f. Bidang Ketahanan Pangan	:	20 orang
g. UPTD BP3MBTP	:	73 orang
h. UPTD BPSDMP	:	31 orang
i. UPTD BP2TDK	:	56 orang
j. UPTD BPTP	:	75 orang
k. Fungsional Induk	:	47 orang
<b>f. Berdasarkan Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat:</b>		
1. Penyuluh Pertanian	:	9 orang
2. PMHP	:	23 orang
3. AHP	:	3 orang
4. Arsiparis	:	1 orang
5. Analis Ketahanan Pangan	:	5 orang
6. POPT	:	43 orang
7. Widyaiswara	:	4 orang

8. PBT	:	20 orang
9. Medik Veteriner	:	4 orang
10. Paramedik	:	3 orang
11. Pengawas Bibit Ternak	:	3 orang
12. Pengawas Mutu Pakan	:	1 orang

Keadaan sarana dan prasarana lingkup kantor induk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY (belum termasuk UPTD) pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Bidang Barang

No	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
	<b>Tanah</b>	<b>5 persil</b>
1	Tanah	5 persil
	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>3.204 unit</b>
2	Alat -Alat Besar	11 unit
3	Alat Alat Angkutan	155 unit
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	14 unit
5	Alat Pertanian	202 buah
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.583 buah
7	Alat Studio dan Alat Komunikasi	165 buah
8	Alat-Alat Kedokteran	9 buah
9	Alat Laboratorium	66 buah
10	Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	0 unit
	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>48 buah</b>
11	Bangunan Gedung	48 buah
12	Monumen	0 buah
	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>27 buah</b>
13	Jalan dan Jembatan	3 km
14	Bangunan Air/ Irigasi	3 unit
15	Instalasi	14 unit
16	Jaringan	7unit
	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>373 buah</b>
17	Buku Perpustakaan	359 buah
18	Barang Bercorak Kebudayaan	14 buah
19	Hewan dan Ternak Serta Tanaman	0 ekor/batang

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi tiga besar penyumbang PDRB DIY dengan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan)

menyumbang sebesar 8,56% pada tahun 2017\* (angka sementara) berdasarkan atas harga yang berlaku dan 7,28% berdasarkan atas harga konstan 2010. Kontribusi sektor pertanian DIY cenderung mengalami penurunan distribusi persentase PDRB rata-rata sebesar 0,22% berdasarkan atas harga yang berlaku dan 0,34% berdasarkan atas harga konstan 2010 dalam kurun waktu 2012-2017\*.

**Tabel 2.2. PDRB Sektor Pertanian Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan**

No.	Kategori	PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahunan Berdasarkan Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	6.588.237	6.741.415	6.539.528	6.666.703	6.766.495	6.883.546
a.	Tanaman Pangan	2.796.755	2.808.221	2.760.024	2.838.358	2.916.633	2.895.314
b.	Tanaman Hortikultura	2.060.483	2.178.314	1.944.551	1.929.982	1.913.550	1.974.731
c.	Tanaman Perkebunan	198.375	208.139	209.146	201.223	201.487	210.219
d.	Peternakan	1.397.691	1.409.960	1.478.302	1.548.209	1.581.601	1.643.457
e.	Jasa Pertanian dan Penebangan Kayu	134.933	136.782	147.506	148.932	153.224	159.825
<b>Pertanian (Tanpa Jasa)</b>		<b>6.453.304</b>	<b>6.604.633</b>	<b>6.392.022</b>	<b>6.517.771</b>	<b>6.613.271</b>	<b>6.723.721</b>
<b>PDRB DIY</b>		<b>71.702.449</b>	<b>75.627.450</b>	<b>79.536.082</b>	<b>83.474.452</b>	<b>87.685.810</b>	<b>92.302.022</b>
<b>Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB DIY (%)</b>		<b>9,00</b>	<b>8,73</b>	<b>8,04</b>	<b>7,81</b>	<b>7,54</b>	<b>7,28</b>

\*) Angka Sementara

Sumber: BPS DIY, 2019

**Tabel 2.3. PDRB Sektor Pertanian Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku**

No.	Kategori	PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahunan Berdasarkan Harga Berlaku (Juta Rupiah)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	7.632.052	8.347.274	8.545.055	9.442.590	10.036.121	10.423.478
a.	Tanaman Pangan	3.268.291	3.318.116	3.277.477	3.808.410	4.134.844	4.232.041
b.	Tanaman Hortikultura	2.359.443	2.847.638	2.864.103	3.023.443	3.114.052	3.268.738
c.	Tanaman Perkebunan	233.658	256.089	282.201	278.972	309.809	332.600
d.	Peternakan	1.616.347	1.757.555	1.930.499	2.136.762	2.265.240	2.358.966
e.	Jasa Pertanian dan Penebangan Kayu	154.314	167.875	190.774	195.004	212.177	231.135
<b>Pertanian (Tanpa Jasa)</b>		<b>6.453.304</b>	<b>7.477.738</b>	<b>8.179.399</b>	<b>8.354.281</b>	<b>9.247.586</b>	<b>9.823.944</b>
<b>PDRB DIY</b>		<b>71.702.449</b>	<b>77.247.861</b>	<b>84.924.543</b>	<b>92.842.484</b>	<b>101.440.518</b>	<b>109.962.354</b>
<b>Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB DIY (%)</b>		<b>9,00</b>	<b>9,68</b>	<b>9,63</b>	<b>9,00</b>	<b>9,12</b>	<b>8,93</b>

\*) Angka Sementara

Sumber: BPS DIY, 2019

Hal ini disebabkan kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, terjadi alih fungsi lahan sawah rata-rata sebesar 0,244% per tahun selama kurun waktu 2012-2017. Alih fungsi lahan terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Penurunan jumlah rumah tangga pertanian juga berdampak pada penurunan kontribusi pertanian. Berikut tabel capaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY:

**Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura		Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura		2.666.800	2.705.000	2.743.600	2.594.577	2.603.465	2.716.562	2.577.518	2.592.808	2.597.138	2.709.684*	101,8	95,3	94,5	100,1	104,08
2	Stabilitas populasi ternak terjaga		Jumlah populasi ternak		644.257	671.634	700.516	620.320	641.416	568.127	607.709	607.812	620.516	620.575*	88,2	90,5	86,8	100	96,8
3	Meningkatnya pendapatan petani melalui nilai tambah produk pertanian		Peningkatan Nilai Tukar Petani		1,7	1,7	1,7	98,55	99	1,70	-1,19	-0,99	99,96	98,15	100	-70	-58,2	101,4	99,1
4	Angka ketersediaan energi				3.511	3.511	3.511	3.511	3.511	3.699	3.701	3.666	3.727	3.727	105,35	105,41	104,41	106,15	106,15
5	Angka ketersediaan protein				90,83	90,83	90,83	90,83	90,83	107,3	111,71	111,09	101,47	101,47	118,13	122,99	122,31	111,71	111,71
6	Angka konsumsi energi				1.874	1.946	1.946	1.946	2.000	1.946,4	1.946,4	2.133,8	2.299,5	2.330,5	103,86	100,02	109,65	118,17	116,53
7	Angka konsumsi protein				53,80	54,40	55,10	55,80	56,50	60	60	63,9	68	70,5	115,24	110,29	115,97	121,86	124,78
8	NTP sektor perkebunan (%)**				124,23	125,86	128	116**	n/a	127,75	141,28	139,75	124,08	121,36	102,83	112,25	109,27	106,97	104,62
9	Produksi Komoditas perkebunan (ton)**				84.600	86.300	88.000	80.125**	n/a	78.619	80.084	82.379	73.755	73.798	92,93	92,80	93,61	92,05	92,10
10	PDRB DIY sub sektor perkebunan (juta rupiah)***				n/a	n/a	n/a	n/a	270.000	n/a	n/a	n/a	n/a	210.219	n/a	n/a	n/a	n/a	77,86

Keterangan:

\*) Angka Sementara

\*\*)

1. Penghitungan NTP pada tahun 2013 – 2014 menggunakan angka dasar tahun 2007, sedangkan untuk tahun 2016 dan 2017 menggunakan angka dasar tahun 2012 sehingga ada penyesuaian target kinerja untuk tahun 2016 dan 2017.
2. Target Produksi Perkebunan untuk tahun 2016 dan 2017 disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan dimana produksi perkebunan mengalami trend menurun dari tahun ke tahun dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut

masih belum mampu mengatasi trend penurunan tersebut dan hanya mampu menghambat laju penurunan produksi karena dipengaruhi faktor di luar kendali SKPD

#) Capaian sementara berdasarkan NBM Tetap 2016

Berdasarkan Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dinilai berdasarkan 10 indikator yaitu (1) Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura, (2) Stabilitas populasi ternak terjaga, (3) Meningkatnya pendapatan petani melalui nilai tambah produk pertanian, (4) Angka ketersediaan energi, (5) Angka ketersediaan protein, (6) Angka konsumsi energi, (7) Angka konsumsi protein, (8) NTP sektor perkebunan, (9) Produksi komoditas perkebunan, dan (10) PDRB DIY sub sektor perkebunan. Target dan capaian urusan pertanian dan ketahanan pangan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 2.5. Target dan Capaian Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan di DIY Tahun 2017**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2016	2017		
				Target	Realisasi	% Realisasi
1	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	ton	2.597.138	2.603.465	2.709.684*	104,08
2	Jumlah populasi ternak	Animal unit	631.616	641.416	620.575*	96,75
3	Nilai Tukar Petani **	Indeks NTP	99,96	99,00	98,15*	99,14
4	Angka ketersediaan energi	kkal/kapita/hari	3.727	3.511	3.727*	106,15
5	Angka ketersediaan protein	gram/kapita/ hari	101,47	90,83	101,47*	111,71
6	Angka konsumsi energi	kkal/kapita/hari	2.299,5	2.000	2.192,7*	109,64
7	Angka konsumsi protein	gram/kapita/ hari	68	56,50	67,27*	119,06
8	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran Perangkat Daerah	%	100	100	100	100
9	NTP sektor perkebunan (%)**	%	124,08	116**	121,36	104,62
10	Produksi Komoditas perkebunan (ton)**	ton	73.755	80.125**	73.798	92,10
11	PDRB subsektor Perkebunan***	juta rupiah	N/A	270.000	210.219	77,86

\*)Angka Sementara

\*\*)

1. Pengukuran indikator Nilai Tukar Petani dengan cara menghitung indikator Angka NTP perbulan per sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. . Penghitungan indikator ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase sumber data dari BPS kemudian diakhir tahun dirata-rata).
2. Penghitungan NTP sektor Perkebunan pada tahun 2013 - 2014 menggunakan angka dasar tahun 2007, sedangkan untuk tahun 2016 dan 2017 menggunakan angka dasar tahun 2012 sehingga ada penyesuaian target kinerja untuk tahun 2016 dan 2017.
3. Target Produksi Perkebunan untuk tahun 2016 dan 2017 disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan dimana produksi perkebunan mengalami trend menurun dari tahun ke tahun dan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut masih belum mampu mengatasi trend penurunan tersebut dan hanya mampu menghambat laju penurunan produksi karena dipengaruhi faktor di luar kendali SKPD.

\*\*\*) Merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada perubahan (review) renstra ke dua pada tahun 2016

Sektor pertanian terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, peternakan, perkebunan. Capaian produksi tanaman pangan di DIY pada tahun 2017 (angka sementara) menurun 101.819 ton (-4,22 %) dibanding tahun 2016 menjadi 2.312.695 ton. Penurunan produksi dikarenakan dampak banjir Badai Cempaka di bulan November yang menggenangi sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo sehingga menyebabkan lahan mengalami puso dan produktivitas menurun karena terganggunya penyerbukan sehingga banyak bulir padi yang hampa. Produksi tanaman pangan tahun 2013-2017 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.6. Produksi Tanaman Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2017 (Angka Tetap) (Ton)**

JenisTanaman	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2013	2014	2015	2016	2017	
Padi Sawah	721.674	719.194	746.810	712.285	678.530	-1,47
Padi Ladang	200.150	200.379	198.326	170.417	202.576	0,97
<b>Total Padi</b>	<b>921.824</b>	<b>919.573</b>	<b>945.136</b>	<b>882.702</b>	<b>881.106</b>	<b>-1,06</b>
Jagung	289.580	312.236	299.084	310.257	311.764	1,96
Kedelai	31.677	19.579	18.822	16.763	8.656	-25,34
Kacang Tanah	70.834	71.582	83.300	75.816	79.907	3,46
Kacang Hijau	318	261	230	289	301	0,00
Ubi Kayu	1.013.565	884.931	873.362	1.125.375	1.025.641	1,50
Ubi Jalar	4.951	5.237	6.070	3.256	5.289	9,44
Cantel/Sorghum	135	145	51	56	31	-23,06

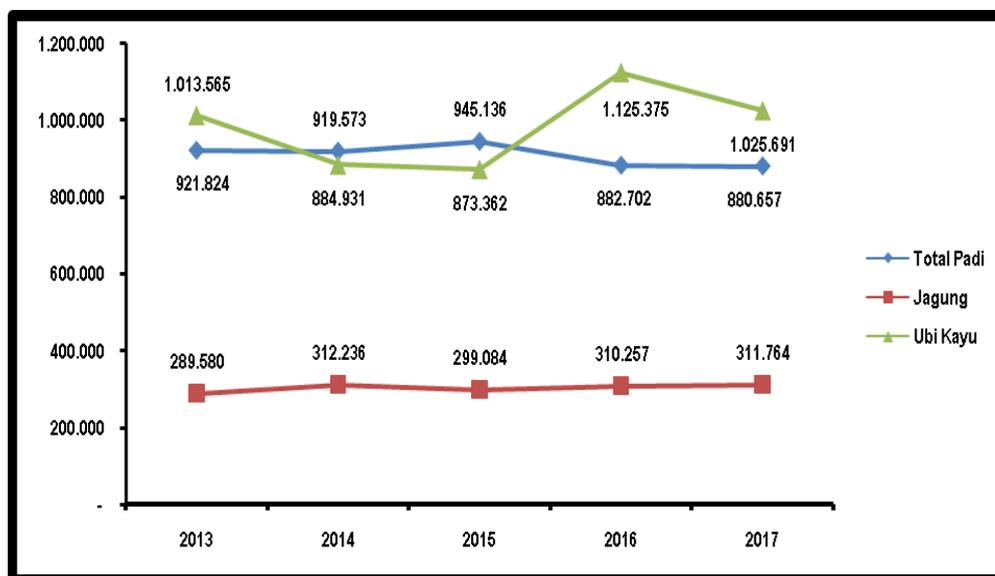
(Sumber: DIY Dalam Angka, 2019)



**Gambar 2.2. Produksi Padi dan Palawija Tahun 2013-2017 (Angka Tetap) di DIY**

(Sumber: DIY Dalam Angka, 2019)

DIY mengalami fluktuasi produksi padi pada kurun waktu 2013-2017, dimana pada tahun 2017 secara keseluruhan jumlah produksi padi mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 1.596 ton. Dilihat dari produksi pertanian sawah dan ladang tahun 2017, pertanian sawah mengalami penurunan sebesar 33.755 ton dan ladang mengalami peningkatan sebesar 32.159 ton bila dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara produksi jagung mengalami peningkatan sebesar 1.507 ton pada tahun 2017 karena peningkatan produktivitas. Produksi jagung selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, dimana produksi tahun 2015, 2016, dan 2017 lebih rendah dibandingkan tahun 2014, ini diakibatkan musim kemarau basah yang mengganggu produksi dan penyusutan lahan pertanian.



**Gambar 2.3. Produksi Padi, Jagung, dan Ubi Kayu (dalam Ton) Tahun 2013-2017 (Angka Tetap)**

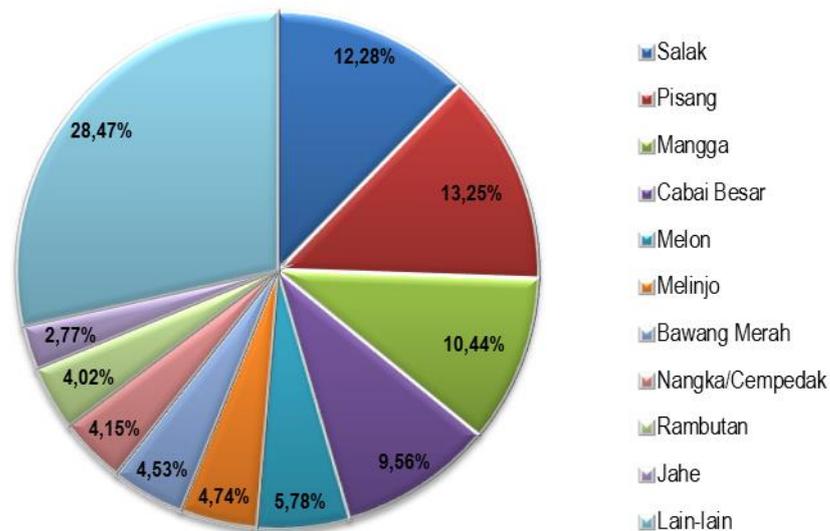
(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019)

Produksi tanaman hortikultura di DIY secara keseluruhan mengalami penurunan dari tahun 2016 dimana penurunan terbesar pada komoditas buah dikarenakan curah hujan yang tinggi di tahun 2016 berdampak pada menurunnya produksi buah (*after effect*). Komoditas cabai dan bawang merah setiap tahun mengalami peningkatan produksi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Sentra cabai berada di Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo sedangkan sentra komoditas bawang merah berlokasi di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul.



**Gambar 2.4. Produksi Cabai dan Bawang Merah (ton)  
Tahun 2013-2017 (Angka Tetap) di DIY**  
(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019)

Komoditas pisang merupakan kontributor terbesar produksi hortikultura di DIY tahun 2017, yaitu sebesar 13,25 %. Produksi pisang terbesar berada di Kabupaten Kulon Progo. Sementara itu, salak merupakan kontributor terbesar kedua dengan sumbangan sebesar 12,28 %. Proporsi produksi hortikultura DIY pada tahun 2017 disajikan dalam diagram pada Gambar 2.4. berikut:



**Gambar 2.5. Proporsi Produksi Hortikultura di DIY Tahun 2017 (Angka Tetap)**  
(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019)

Sektor peternakan memiliki sebaran ternak besar maupun kecil pada sejumlah kabupaten dan kota. Untuk ternak di wilayah DIY, sebagian besar atau 99% terdiri atas jenis sapi potong, kambing, dan domba. Jumlah populasi ternak tahun 2017 mengalami penurunan 3,25% bila dibandingkan dengan tahun 2016. Peternakan di DIY masih didominasi ternak sapi potong dan ternak kecil, sedangkan ternak sapi perah tidak terlalu banyak, hal ini dikarenakan iklim dan topografi DIY tidak terlalu cocok untuk pengembangan ternak sapi perah, kecuali di kabupaten Sleman. Populasi ternak sapi potong sebagian besar dari Gunungkidul dengan kontribusi sebesar 48,90%, Sleman berkontribusi sangat besar terhadap populasi sapi perah dengan peranan sebesar 96,47%, dan Gunungkidul juga menyumbang jumlah populasi kambing terbesar DIY dengan proporsi sebesar 45,57%. Berikut Tabel Populasi ternak DIY Tahun 2016-2017.

**Tabel 2.7. Populasi Ternak DIY Tahun 2016-2017**

No	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)		Populasi (Animal Unit)	
		2016	2017	2016	2017
1	Sapi Potong	304.450	309.960	231.382	235.570
2	Sapi Perah	4.045	4.003	3.074	3.042
3	Kambing	395.895	401.219	43.548	44.134
4	Itik	509.246	496.196	15.277	14.886

*Keterangan : Angka Tetap*

*(Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019)*

Realisasi produksi perkebunan tahun 2017, mencapai sebesar 73.798,21 ton meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 73.755,65 ton, namun untuk beberapa komoditas perkebunan unggulan DIY mengalami penurunan produksi seperti kelapa, jambu mete, dan tebu. Sektor perkebunan di beberapa komoditas strategis menunjukkan peningkatan produksi yang signifikan pada tahun 2017 jika dibandingkan tahun 2016 di antaranya komoditas kopi dan tembakau. Peningkatan tertinggi adalah produksi kopi yang mengalami peningkatan 401,78% di tahun 2017. Kopi mengalami peningkatan dari 584,67 ton tahun 2016 menjadi 2.933,75 ton di tahun 2017. Produksi tembakau di tahun 2017 sebesar 1.483 ton meningkat 252,30% dari tahun 2016. Produksi komoditas unggulan perkebunan tahun 2016 dan 2017 terdapat pada Tabel 2.8.

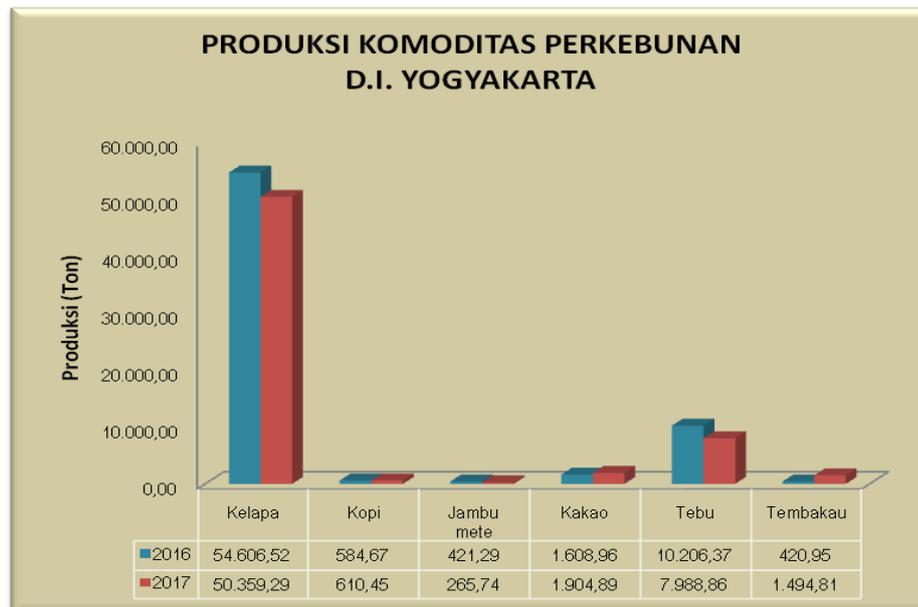
**Tabel 2.8. Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan Tahun 2016-2017**

No	Komoditas	Produksi (ton)		Selisih	
		2016	2017	(ton)	%
1.	Kelapa	54.606,52	50.359,29	-4.247,23	-7,78
2.	Kopi	584,67	610,45	25,78	4,41
3.	Jambu mete	421,29	265,74	-155,55	-36,92
4.	Kakao	1.608,96	1.904,89	295,93	18,39
5.	Tebu	10.206,37	7.988,86	-2.217,51	-21,73
6	Tembakau	420,95	1.494,81	1.073,86	255,10

Keterangan : Angka Tetap

(Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019)

Distribusi produksi tanaman perkebunan tahun 2016 dan 2017 ditunjukkan oleh Gambar 2.6. berikut.

**Gambar 2.6. Distribusi Produksi Tanaman Perkebunan di DIY Tahun 2016-2017**

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2019)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Penghitungan indikator ini diperoleh dari perbandingan antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (IT) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (IB) yang dinyatakan dalam persentase. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) antara produk pertanian yang dijual petani dengan barang dan jasa yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga, dengan membandingkan kedua perkembangan angka tersebut, maka dapat diketahui apakah

peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan penambahan pendapatan petani dari hasil pertaniannya atau sebaliknya, apakah kenaikan harga jual produksi pertanian dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan para petani. Semakin tinggi nilai NTP, relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. Dilihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) secara umum di tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 2,11% menjadi 103,95%. Penurunan NTP terbesar terdapat pada NTP peternakan yang turun sebesar 5,97% dari 98,49% menjadi 92,52% yang menunjukkan adanya penurunan tingkat kemampuan dan daya beli peternak. Tabel Nilai Tukar Petani Tahun 2016 dan 2017 terdapat pada Tabel 2.7.

**Tabel 2.9. Nilai Tukar Petani Tahun 2016-2017**

No.	Nilai Tukar Petani (NTP)	2016	2017
1.	Pertanian Tanaman Pangan	100,17	100,62
2.	Pertanian Hortikultura	101,50	101,30
3.	Perkebunan	124,08	121,36
4.	Peternakan	98,49	92,52
<b>Rata-rata</b>		<b>106,06</b>	<b>103,95</b>

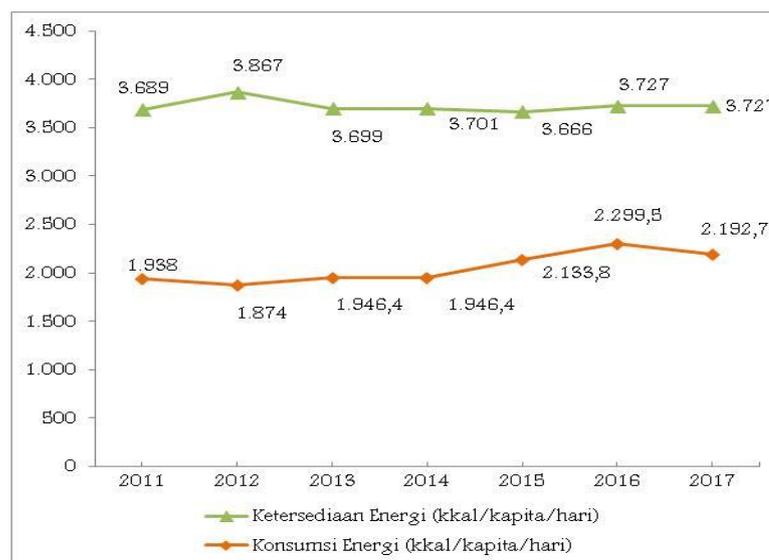
(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2019)

Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan didukung oleh 3 (tiga) sub sistem penyusunnya, yaitu dari sisi ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan yang memenuhi kaidah B2SA. Sasaran strategis pertama adalah terwujudnya ketersediaan pangan dengan indikator kinerja angka ketersediaan energi dan angka ketersediaan protein. Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi baik dari hasil produksi dalam daerah maupun dari impor. Capaian indikator ketersediaan energi dan protein tahun 2017 berturut-turut sebesar 3.670 kal/kapita/hari dan 103,34 gr/kapita/hari, telah melebihi angka kecukupan gizi yang dianjurkan yaitu sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan 57 gr/kapita/hari.

Salah satu komponen yang menentukan ketersediaan pangan adalah cadangan pangan. Cadangan pangan daerah terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan dapat digunakan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Berdasarkan SK Gubernur DIY Nomor 201/KEP/2018 tentang Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) DIY sebesar 267 ton beras, sampai dengan tahun 2017 baru tersedia sebanyak 183,62 ton. Mengingat wilayah DIY terletak di wilayah rawan bencana dengan perkembangan jumlah penduduk yang semakin meningkat, serta untuk mengantisipasi berbagai keadaan darurat lainnya maka secara bertahap jumlah CPPD DIY akan terus ditingkatkan. Selain melalui peningkatan CPPD, upaya menghimpun cadangan pangan juga dilakukan melalui Lumbung Pangan Masyarakat yang sampai tahun 2017 sudah terbentuk sebanyak 133 unit, tersebar di 4 Kabupaten dengan stok cadangan pangan mencapai 146,7 ton beras sedangkan cadangan pangan di Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang ada di 57 Gapoktan mencapai 350 ton beras.

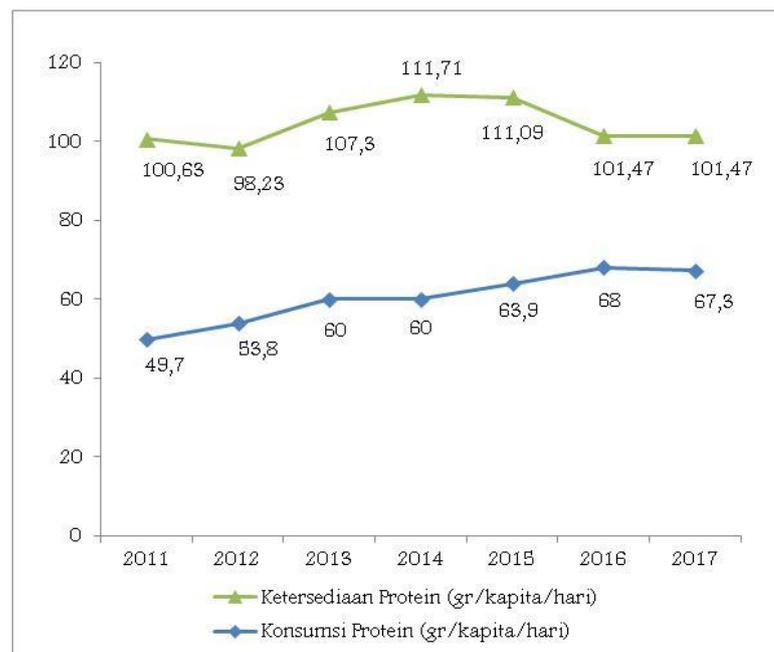
Dari sisi konsumsi, sasaran strategis kedua adalah meningkatnya konsumsi pangan masyarakat dengan indikator kinerja angka konsumsi energi dan angka konsumsi protein. Capaian tahun 2017, angka konsumsi energi di DIY adalah 2.193 kkal/kapita/hari dan skor PPH 89, skor maksimum 100. Jika dibandingkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan 2.150 kkal/kapita/hari dan 57 gr/kapita/hari maka tingkat konsumsi energi di DIY sudah melebihi yang dianjurkan, namun jika dilihat dari keberagaman jenis/golongan pangan yang dikonsumsi masyarakat masih perlu ditingkatkan khususnya konsumsi dari kelompok pangan umbi-umbian, minyak dan lemak, kacang-kacangan, serta sayur dan buah.



**Gambar 2.7. Perbandingan Capaian Ketersediaan dan Konsumsi Energi Tahun 2011-2017**

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2018)

Pengembangan dan pemanfaatan pangan lokal terutama umbi-umbian menjadi alternatif terbaik dalam memenuhi kebutuhan energi sekaligus menjaga kesehatan masyarakat dari ancaman penyakit degeneratif seperti diabetes, kanker, dan serangan jantung karena umbi-umbian dapat dikembangkan menjadi makanan fungsional yang memiliki indeks glikemik rendah, kaya kandungan prebiotik dan antioksidan. Perbandingan antara tingkat ketersediaan dengan tingkat konsumsi energi maupun protein di DIY pada tahun 2011-2017 dapat dilihat pada gambar 2.7 dan gambar 2.8. Realisasi capaian indikator angka ketersediaan dan konsumsi energi maupun protein tahun 2011-2017 sudah melampaui target yang ditetapkan seperti terlihat dalam tabel 2.3. Dari gambar 2.7 dan gambar 2.8 juga terlihat bahwa tingkat ketersediaan energi dan protein lebih tinggi dibanding tingkat konsumsi masyarakat DIY. Kondisi ini menggambarkan ketersediaan pangan di DIY mencukupi bahkan melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat DIY.



**Gambar 2.8. Perbandingan Capaian Ketersediaan dan Konsumsi Protein Tahun 2011-2017**

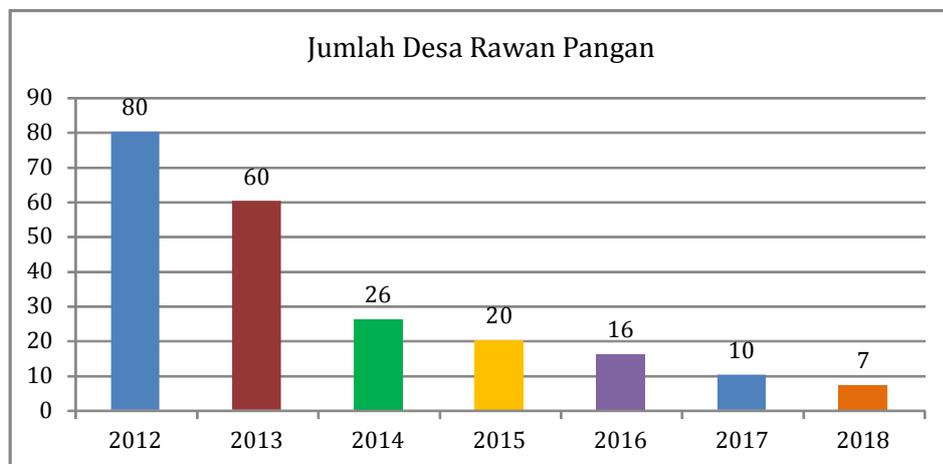
(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2018)

Selain mutu/kualitas konsumsi, aspek keamanan pangan sangat penting didukung dengan terbukanya pasar terhadap masuknya produk pangan dari luar daerah maupun dari luar negeri, masalah dan tantangan keamanan pangan semakin kompleks. Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) telah berperan aktif di DIY dalam mengamankan pangan yang diproduksi maupun pangan yang beredar, baik segar maupun olahan, sehingga pangan yang dikonsumsi masyarakat DIY aman dari berbagai cemaran

fisik, biologis, kimiawi, maupun mikrobiologis. Pembinaan terhadap produsen pangan juga terus dilaksanakan agar produsen pangan di DIY dapat menyediakan pangan yang bermutu dan aman, sekaligus dapat bersaing menghadapi pasar bebas.

Distribusi dan akses pangan telah tertangani dengan baik. Fasilitasi diberikan kepada gapoktan di daerah rawan pangan dengan tujuan mendekatkan pangan ke masyarakat sehingga tersedia pangan sesuai kebutuhan masyarakat setempat dengan harga terjangkau secara kontinu. Gapoktan di daerah sentra produksi pangan juga difasilitasi agar dapat menampung dan mengelola hasil panen masyarakat setempat sehingga harga pangan terjaga, tidak merugikan petani saat panen raya dan tidak memberatkan konsumen saat musim paceklik. Harga pangan pokok yang juga berpengaruh terhadap inflasi juga dipantau secara rutin dan bila perlu dilakukan pengendalian melalui operasi pasar oleh instansi terkait. Harga pangan pokok di DIY selama tahun 2017 relatif terkendali. Hal ini sangat didukung oleh keberadaan Tim Pemantau dan Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

Keberhasilan pencapaian ketiga sub sistem ketahanan pangan tersebut secara sinergis telah mendukung upaya penurunan kemiskinan dan kerawanan pangan di DIY. Selama periode 5 tahun sebelumnya, jumlah desa rawan pangan di DIY turun dari 80 desa di tahun 2012 menjadi 10 desa di tahun 2017. Pada tahun 2018, desa rawan pangan di DIY masih tersisa 7 desa yang tersebar di Kabupaten Gunungkidul 2 desa, Kabupaten Bantul 2 desa, dan Kabupaten Kulonprogo 3 desa. Grafik penurunan jumlah desa rawan pangan dapat dilihat pada gambar 2.9.



**Gambar 2.9. Jumlah Desa Rawan Pangan di DIY Tahun 2012-2017**

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2018)

Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Tahun 2016 (Angka Tetap) diketahui realisasi ketersediaan pangan DIY Tahun 2016 total 1.902.000 ton dengan jumlah penduduk DIY pada Tahun 2016 sebanyak 3.720.900 jiwa. Proyeksi ketersediaan pangan tahun 2017 hingga 2020 terlihat di Tabel 2.10.

**Tabel 2.10. Proyeksi Ketersediaan Pangan DIY Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Angka Tetap Tahun 2016**

No.	Kelompok Jenis Pangan	Aktual Tahun 2017		Proyeksi Ketersediaan Pangan (Gram/Kapita/Hari)			
		Ketersediaan (Gram)	Kontribusi (%)	2018	2019	2020	2021
1	Padi-padian	531,7	36,3	491,4	451,0	410,7	370,3
2	Umbi-umbian	149,5	10,2	141,2	132,9	124,6	116,3
3	Pangan Hewani	205,8	14,1	198,3	190,7	183,1	175,6
4	Minyak dan Lemak	67,3	4,6	59,8	52,4	44,9	37,5
5	Buah/Biji Berminyak	51,2	3,5	43,3	35,5	27,7	19,8
6	Kacang-kacangan	78,4	5,4	71,1	63,8	56,5	49,3
7	Gula	50,0	3,4	47,2	44,4	41,6	38,8
8	Sayur dan Buah	330,6	22,6	319,6	308,7	297,8	286,9
9	Lain-lain	0,0	0,0	3,6	7,2	10,8	14,4
<b>Total Pangan</b>		<b>1464,5</b>	<b>100,1</b>	<b>1375,5</b>	<b>1286,6</b>	<b>1197,7</b>	<b>1108,9</b>

No.	Kelompok Jenis Pangan	Aktual Tahun 2017		Proyeksi Ketersediaan Pangan (Kg/Kapita/Tahun)			
		Ketersediaan (Kg)	Kontribusi (%)	2018	2019	2020	2021
1	Padi-padian	194,1	36,3	179,4	164,6	149,9	135,2
2	Umbi-umbian	54,6	10,2	51,5	48,5	45,5	42,4
3	Pangan Hewani	75,1	14,0	72,4	69,6	66,8	64,1
4	Minyak dan Lemak	24,6	4,6	21,8	19,1	16,4	13,7
5	Buah/Biji Berminyak	18,7	3,5	15,8	13,0	10,1	7,2
6	Kacang-kacangan	28,6	5,3	25,9	23,3	20,6	18,0
7	Gula	18,3	3,4	17,2	16,2	15,2	14,2
8	Sayur dan Buah	120,7	22,6	116,7	112,7	108,7	104,7
9	Lain-lain	0,0	0,0	1,3	2,6	3,9	5,3
<b>Total Pangan</b>		<b>534,7</b>	<b>100</b>	<b>502</b>	<b>469,6</b>	<b>437,1</b>	<b>404,8</b>

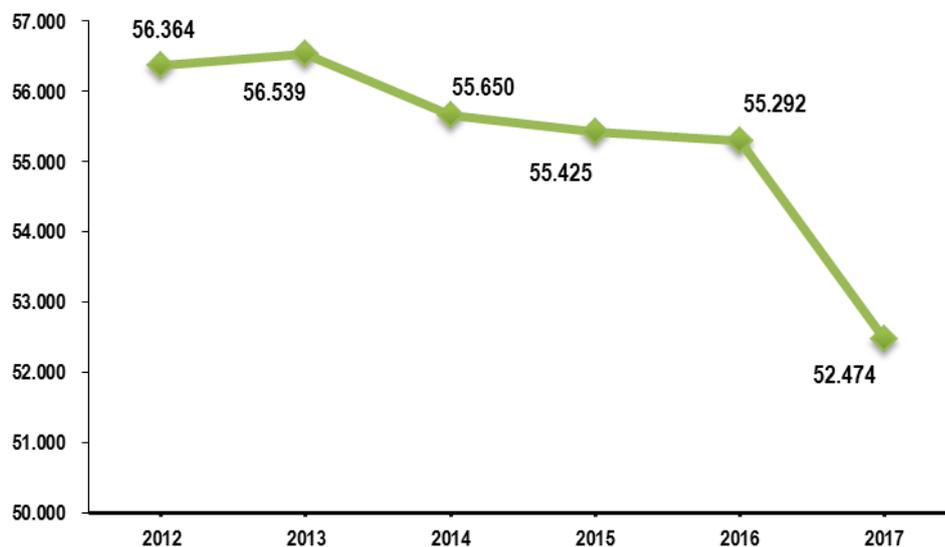
No.	Kelompok Jenis Pangan	Aktual Tahun 2017		Proyeksi Ketersediaan Pangan ('000 Ton/Tahun)			
		Ketersediaan (Ton)	Kontribusi (%)	2018	2019	2020	2021
1	Padi-padian	730,2	36,3	682,1	632,7	582,0	530,0
2	Umbi-umbian	205,3	10,2	196,0	186,4	176,6	166,4
3	Pangan Hewani	282,6	14,1	275,2	267,5	259,5	251,2
4	Minyak dan Lemak	92,4	4,6	83,1	73,5	63,7	53,6
5	Buah/Biji Berminyak	70,2	3,5	60,1	49,8	39,2	28,4
6	Kacang-kacangan	107,6	5,4	98,7	89,5	80,1	70,5
7	Gula	68,7	3,4	65,6	62,3	59,0	55,5
8	Sayur dan Buah	453,9	22,6	443,7	433,1	422,0	410,6
9	Lain-lain	0,0	0,0	5,0	10,1	15,3	20,6
<b>Total Pangan</b>		<b>2010,9</b>	<b>100</b>	<b>1909,5</b>	<b>1804,9</b>	<b>1697,4</b>	<b>1586,8</b>

Tahun	Aktual 2017	Proyeksi Tahun			
		2018	2019	2020	2021
<b>Jumlah Penduduk DIY (jiwa)</b>	3.762.200	3.802.900	3.842.900	3.882.300	

(Sumber: Neraca Bahan Makanan Tahun 2017 (Tetap))

Diketahui berdasarkan proyeksi ketersediaan pangan DIY NBM tahun 2016 bahwa prediksi peningkatan jumlah penduduk DIY di tahun 2017-2020 berbanding terbalik dengan proyeksi ketersediaan pangan yang menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan semakin menyusutnya area lahan pertanian DIY akibat peningkatan kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat, pertumbuhan sektor non pertanian, perkembangan kawasan perkotaan/urban, perubahan preferensi usaha akibat skala usaha pertanian yang tidak ekonomis, SDM pertanian yang kurang produktif, dan kerentanan petani menghadapi instabilitas harga produk segar pada saat panen. Sementara itu di sisi lain, upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan belum memberikan hasil yang diharapkan. Pada rentang tahun 2012-2017, lahan sawah DIY mengalami penurunan dari 56.364 ha menjadi 52.474 ha (rata-rata 648,3 ha/tahun atau setara dengan 1,78 Ha/hari). Tantangan ke depan yang harus dijawab adalah bagaimana lahan produktif yang masih ada, dapat dimanfaatkan secara optimal dan arif agar tidak berkurang fungsi dan kemanfaatannya. Upaya perlindungan lahan pertanian juga belum didukung dengan langkah penetapan lahan dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di masing-masing kabupaten. Penurunan lahan sawah di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada gambar 2.10.



**Gambar 2.10. Perkembangan Luas Lahan Sawah di DIY**  
(Sumber: BPS, 2018)

Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.925.427.494	2.009.681.316	1.989.843.316	2.120.379.695	2.152.248.250	1.672.967.342	1.722.774.761	1.849.758.346	1.924.488.080	1.938.352.183	86.89	85.72	92.96	90.62	90.06	2,86	3,78
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.857.311.939	12.966.901.203	12.494.465.988	14.852.562.177	5.425.918.100	8.705.154.868	12.263.207.960	11.447.429.738	14.041.612.282	5.152.744.119	80.18	94.57	91.62	94.54	94.97	-7,20	-1,61
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	12.095.400	15.000.000	19.559.400	34.916.500	38.408.100	11.543.000	14.725.560	19.532.017	32.433.937	35.616.500	95.43	98.17	99.86	92.89	92.73	35,73	34,02
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	219.739.800	229.969.600	261.671.350	237.316.750	366.186.120	199.560.850	203.862.410	248.875.621	215.934.511	330.968.665	90.82	88.65	95.11	90.99	90.38	15,86	16,07
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	397.469.375	0	0	0	0	342.761.725	0	0	0	0	86.24	0	0	0	0		
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	993.621.280	0	0	0	0	874.063.220	0	0	0	0	87.97	0	0	0	0		
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1.592.151.000	1.609.215.350	1.921.494.650	2.125.854.750	1.585.067.000	1.392.462.950	1.555.414.545	1.826.764.964	1.834.400.064	1.503.856.500	87.46	96.66	95.07	86.29	94.88	1,42	2,89
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	343.336.030	0	0	0	0	297.056.100	0	0	0	0	86.52	0	0	0	0		
Program Peningkatan produksi pertanian/Perkebunan	7.329.985.720	0	0	0	0	5.557.160.075	0	0	0	0	75.81	0	0	0	0		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak	553.995.300	0	0	0	0	513.179.150	0	0	0	0	92.63	0	0	0	0		
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	3.749.163.750	7.586.030.450	6.864.571.900	6.620.773.255	4.346.895.641	2.471.261.275	6.954.321.133	6.661.380.572	6.478.426.630	2.747.624.741	65.91	91.67	97.04	97.85	63.21	13,73	29,22
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	491.973.750	0	0	0	0	485.285.400	0	0	0	0	98.64	0	0	0	0		
Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani	664.483.410	1.237.871.350	1.340.876.650	840.031.225	0	632.460.340	1.174.773.640	1.288.046.110	781.565.052	0	95.18	94.90	96.06	93.04	0	-10,69	-10,98

RENSTRA 2017-2022

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Produksi tanaman Pangan	0	6.492.158.450	4.170.936.825	2.989.736.205	2.753.710.775	0	5.666.474.051	3.633.720.162	2.625.885.309	2.546.245.845	0	87.28	87.12	87.83	92.47	-23,99	-22,21
Program Peningkatan Produksi Hortikulura	0	2.431.926.750	1.803.726.600	2.353.690.175	3.132.418.995	0	2.116.316.390	1.590.886.861	2.183.989.113	2.765.813.097	0	87.02	88.20	92.79	88.30	12,58	13,03

Tabel 2.12. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	524.528.350	529.252.000	563.813.900	785.930.000	926.651.844	454.789.910	495.751.568	510.887.157	649.438.441	805.236.501	0,87	0,94	0,91	0,83	0,87		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.942.980.000	3.934.343.750	1.413.500.000	810.270.550	643.582.500	2.516.600.070	3.657.902.752	1.340.631.625	783.016.646	615.446.847	0,86	0,93	0,95	0,97	0,96		
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	30.673.000	34.000.000	36.600.000	22.550.000	26.075.000	27.477.260	33.782.000	34.170.175	16.189.996	23.459.125	0,90	0,99	0,93	0,72	0,90		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	173.463.500	231.738.300	202.000.000	217.658.000	236.183.000	167.168.900	225.324.825	198.826.600	194.870.725	228.807.574	0,96	0,97	0,98	0,90	0,97		
Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan	653.653.300	513.380.000	1.338.189.050	869.161.175	1.003.123.125	582.420.88	503.751.685	1.262.257.875	831.503.859	979.629.756	0,89	0,98	0,94	0,96	0,98		
Program Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan	585.306.580	609.500.000	764.874.000	636.380.481	691.122.750	547.757.840	603.973.750	712.629.865	632.010.481	673.585.072	0,94	0,99	0,93	0,99	0,97		
Program Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	937.448.800	877.148.050	1.240.596.500	1.674.947.450	2.176.095.575	884.066.780	849.087.985	1.175.931.500	1.548.975.943	2.047.168.913	0,94	0,97	0,95	0,92	0,94		
Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan	484.608.750	535.000.000	610.000.000	342.326.250	211.292.500	476.134.800	524.126.850	568.993.650	303.189.900	211.221.000	0,98	0,98	0,93	0,89	1,00		
Program Pemberdayaan Penyuluhan	728.075.400	1.173.863.700	1.132.000.000	1.572.147.900	2.508.742.960	708.903.500	1.021.756.300	1.032.599.400	1.474.665.766	1.990.302.600	0,97	0,87	0,91	0,94	0,79		

Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan	1.805.000.000	1.134.000.000	507.000.000	622.000.000	2.166.000.000	1.682.000.000	1.044.000.000	465.000.000	521.000.000	2.047.000.000	93,15	92,04	91,76	83,80	94,48	44,65	0,64
Program Peningkatan Produksi Perkebunan	N/A	1.315.000.000	1.349.000.000	1.617.000.000	N/A	N/A	1.220.000.000	1.318.000.000	1.493.000.000	N/A	N/A	92,77	97,74	92,30	N/A	-19,39	-0,05

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan lima tahun ke depan akan dihadapkan pada tantangan perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis. Persoalan mendasar banyak yang membutuhkan penyelesaian, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kecilnya status dan luas kepemilikan lahan; tingginya alih fungsi lahan; belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional; terbatasnya akses petani terhadap permodalan; belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik; dan rendahnya nilai tukar petani yang diakibatkan rendahnya daya saing produk pertanian.

### 1. Lahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian terkait dengan lahan adalah sebagai berikut:

#### a. Konversi lahan

Dewasa ini, keberlanjutan sektor pertanian dihadapkan pada ancaman penurunan luas lahan pertanian akibat konversi lahan pertanian produktif ke penggunaan non pertanian yang terjadi secara masif. Menyusutnya area lahan pertanian DIY akibat peningkatan kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana pendukung kehidupan masyarakat, pertumbuhan sektor non pertanian, perkembangan kawasan perkotaan/urban, perubahan preferensi usaha akibat skala usaha pertanian yang tidak ekonomis, SDM pertanian yang kurang produktif, dan kerentanan petani menghadapi instabilitas harga produk segar pada saat panen. Sementara itu di sisi lain, upaya perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan belum memberikan hasil yang diharapkan. Pada rentang tahun 2012-2017, lahan sawah DIY mengalami penurunan dari 56.364 ha menjadi 52.747 ha (rata-rata 723 ha/tahun atau setara dengan 1,98 ha/hari).

Upaya pengendalian terhadap terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian secara efektif tertuang dalam UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) namun konversi lahan pertanian masih terus berlangsung. Hal ini menjadi tantangan bagi keberlanjutan produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan.

b. Keterbatasan cetak lahan baru

Kemampuan cetak sawah oleh Pemerintah memang belum sesuai dengan laju konversi lahan sawah setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan persoalan masalah status penguasaan dan kepemilikan lahan.

c. Penurunan kualitas lahan

Sebagian besar lahan pertanian mengalami penurunan kualitas bahkan beberapa masuk dalam kategori kritis. Hal ini dikarenakan pemakaian bahan kimia anorganik yang berlebihan yang berakibat pada struktur tanah menjadi padat dan daya dukung terhadap pertumbuhan tanaman menurun. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka kerusakan lahan akan semakin meluas dan berakibat pada penurunan produktivitas lahan dan tanaman.

d. Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit

Berdasarkan Renstra Kementan 2015-2019, pada tahun 2012, luas penguasaan lahan per petani yaitu 0,22 hektar dan diperkirakan akan menjadi 0,18 hektar pada tahun 2050. Luas penguasaan lahan pertanian oleh petani yang semakin sempit menyebabkan upaya peningkatan kesejahteraan petani terhambat.

e. Ketidakpastian status kepemilikan lahan

Status penguasaan lahan oleh petani sebagian besar belum bersertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan memperoleh kredit perbankan. Pesatnya laju pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya lahan telah membawa implikasi terhadap pelanggaran tata ruang. Kondisi tersebut pada kenyataannya sulit diimbangi dengan penyediaan lahan, baik melalui pemanfaatan lahan pertanian yang ada maupun pembukaan lahan baru. Upaya menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

2. Infrastruktur

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian

sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan di daerah aliran sungai, serta kurangnya pemeliharaan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk menggerakkan proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, dan pergudangan. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah mengenai penyediaan semua prasarana yang dibutuhkan petani tersebut secara memadai untuk menekan biaya produksi yang tinggi akibat terbatasnya prasarana transportasi dan logistik pada sentra produksi komoditas pertanian.

Disamping itu, masalah transportasi distribusi ternak belum optimal, yaitu tata niaga daging sapi domestik masih mengandalkan pada pengiriman sapi hidup dan masih memiliki hambatan, sehingga belum efisien. Penyebab inefisiensi diantaranya: belum memadainya jumlah dan kapasitas alat angkut dan minimnya kualitas sarana angkutan baik truk maupun kapal yang digunakan. Belum semua pelabuhan memiliki *holding ground* untuk tempat pengumpulan ternak dan pemeriksaan karantina. Kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya retribusi selama proses pengangkutan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke daerah tujuan.

### 3. Sarana Produksi

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum perkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

#### 4. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Kelembagaan dan sumberdaya manusia merupakan dua hal yang saling terkait dan masih menjadi permasalahan dalam proses pembangunan pertanian. Beberapa kondisi kelembagaan dan sumberdaya manusia saat ini secara umum, sebagai berikut:

##### a. Kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat sosial budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan peluang akses terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan ekonomi petani, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/keompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air dan Subak dihadapkan pada tantangan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

##### b. Keterbatasan petani dalam pemanfaatan teknologi

Dari sisi sumberdaya manusia, masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia pertanian merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian. Hal ini dikarenakan sebagian besar petani yang berpendidikan rendah dan tinggal di daerah pedesaan. Kondisi ini juga semakin diperparah dengan kurangnya pendampingan penyuluhan pertanian. Di sisi lain, bagi mereka yang telah mengenyam pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi, mereka kurang tertarik bekerja dan berusaha di pertanian, sehingga mengakibatkan tingginya urbanisasi ke perkotaan. Kondisi ini dapat ditekan dengan mengembangkan agroindustri pertanian di pedesaan, karena akan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan peluang usaha agroindustri di pedesaan. Agroindustri di desa ini memegang peran penting dalam proses produksi seperti penyediaan dan distribusi sarana produksi, usaha jasa pelayanan alat dan mesin pertanian, usaha industri pasca panen dan pengolahan hasil, usaha jasa

transportasi hasil pertanian, pengelolaan lembaga keuangan mikro, konsultan manajemen agribisnis serta tenaga pemasaran produk agroindustri.

c. Menurunnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian

Fakta dan pandangan bahwa pertanian sebagai salah satu sektor yang antara lain kurang menjanjikan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, lahan pertanian yang semakin berkurang, sangat menentukan terhadap menurunnya minat generasi muda untuk memilih pertanian sebagai masa depannya. Rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian ini menyebabkan kesenjangan regenerasi di sektor pertanian. Bidang pertanian sebagai pemasok bahan pangan bagi manusia dimungkinkan tidak akan mengalami perkembangan, dan akan berimbas pada menurunnya jumlah bahan pangan yang dihasilkan. Hilangnya minat generasi muda cerdas terdidik dari dunia pertanian Indonesia akan menyulitkan sektor pertanian dalam menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan.

5. Permodalan

Kondisi petani secara umum memiliki lahan sempit, skala usaha kecil dan letaknya yang menyebar dan lebih banyak sebagai buruh tani sehingga lebih mudah dilayani oleh pelepas uang/sumber modal non formal meskipun suku bunga tinggi tetapi waktu perolehannya lebih cepat. Terbatasnya pembinaan, pengawalan dan pendampingan bagi petani yang mengajukan kredit kepada perbankan untuk modal usaha tani serta tingkat kemauan membayar kembali kredit rendah merupakan salah satu faktor penghambat perbankan dalam menyalurkan kredit kepada petani.

Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, mengamanatkan bahwa Pemerintah menugasi BUMN bidang perbankan dan pemda menugasi BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan usahatani, dengan membentuk unit khusus pertanian sehingga pelayanan kebutuhan pembiayaan dengan prosedur mudah dan persyaratan lunak. Tentunya hal ini akan ditindaklanjuti untuk dapat diimplentasikan sehingga petani mendapatkan kemudahan dalam mengakses kredit perbankan. Usaha pertanian juga memiliki risiko yang tinggi baik dari gangguan alam (banjir, kekeringan), serangan hama dan penyakit tanaman serta tidak adanya jaminan harga dan pasar hasil produksi pertanian dapat diatasi melalui pengembangan asuransi pertanian.

Tantangan daerah bahkan menjadi tantangan nasional dan global di masa mendatang adalah terkait penyediaan pangan dan energi bagi penduduk yang jumlahnya semakin meningkat; perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan bencana alam; kondisi perekonomian global; peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi; dan distribusi dan pemasaran produk pertanian.

#### 1. Pemenuhan Pangan Masyarakat dan Energi

Apabila dikaitkan dengan preferensi konsumen maka ketahanan pangan secara umum akan menjadi suatu tantangan yang nyata. Di lain pihak, tantangan yang harus dihadapi adalah terkait ketersediaan lahan garapan cenderung terus menurun karena degradasi, intensitas erosi permukaan tanah maupun perluasan industri, perumahan dan sektor-sektor lainnya. Tantangan bagi sektor pertanian adalah memanfaatkan dan pengalokasian sumberdaya alam dan ekosistem yang terbatas secara efektif dan adaptif dalam memproduksi pangan dan menjamin ketersediaan pangan dan gizi cukup bagi penduduk.

#### 2. Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah perubahan pola dan intensitas curah hujan, makin sering terjadinya fenomena iklim ekstrim *El-Nino* dan *La-Nina* yang dapat mengakibatkan kekeringan dan banjir, kenaikan suhu udara dan permukaan laut, dan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, ekspansi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, salah satunya melalui sistem informasi iklim dan penyesuaian pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Disamping itu, inovasi dan teknologi tepat guna sangat penting dan strategis untuk dikembangkan dalam rangka untuk upaya adaptasi dan

mitigasi terhadap perubahan iklim. Penciptaan varietas unggul yang memiliki potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah, toleran terhadap suhu tinggi maupun rendah, kekeringan, banjir/genangan dan salinitas menjadi sangat penting.

### 3. Kondisi Perekonomian Global

Saat ini, tingkat konsumsi aneka produk hasil pertanian Indonesia, kecuali beras, gula dan minyak goreng, masih relatif rendah. Rendahnya tingkat konsumsi produk pertanian ini, terutama disebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk Indonesia sehingga mempengaruhi daya beli. Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian Indonesia.

### 4. Peningkatan Jumlah Penduduk dan Urbanisasi

Semakin meningkatnya jumlah penduduk DIY, sementara kapasitas ketersediaan lahan pertanian semakin berkurang akibat konversi lahan yang cukup tinggi untuk kebutuhan perumahan dan industri perlu langkah-langkah strategis dalam rangka menjaga atau mengurangi laju konversi lahan yang terus terjadi. Laju urbanisasi yang tinggi dimana generasi muda cenderung meninggalkan perdesaan/pertanian menunjukkan sektor pertanian kurang diminati generasi penerus. Fenomena urbanisasi dipandang sebagai konsekuensi dari berkembangnya sektor industri di perkotaan yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi dibandingkan sektor tradisional perdesaan. Kondisi ini mengakibatkan transfer tenaga kerja sektor pertanian perdesaan ke sektor industri ke perkotaan. Laju urbanisasi ini juga berdampak pada semakin langkanya ketersediaan tenaga kerja muda di pertanian, karena diserap oleh kegiatan industri di perkotaan. Kondisi ini semakin dominannya petani berusia tua di pedesaan yang mengusahakan budidaya pertanian. Oleh karena itu tantangan ke depan perlu menciptakan kegiatan pertanian yang lebih diminati oleh generasi muda. Salah satunya adalah pengembangan agro industri di pedesaan.

### 5. Distribusi dan Pemasaran Produk Pertanian

Masalah yang dijumpai dalam mendukung kelancaran distribusi dan akses pangan adalah : (1) infrastruktur distribusi, (2) sarana dan prasarana pasca panen, (3) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (4) sistem

informasi pasar, (5) keterbatasan lembaga pemasaran daerah, (6) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (7) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (8) adanya penurunan akses pangan karena terkena bencana.

Kestabilan pasokan bahan pangan sangat berpengaruh terhadap perkembangan harga yang terjadi, oleh sebab itu kelancaran sarana dan prasarana distribusi sangat berpengaruh terhadap kecepatan distribusi bahan pangan tersebut. Dari sudut pandang produsen pangan dan produk pertanian, pemasaran merupakan bagian hilir dari segala upaya yang dilakukan dalam kegiatan produksi. Dalam pasar dan pemasaran, faktor kualitas, kontinuitas dan kuantitas menjadi faktor kunci. Tantangan ke depan bagi produsen pertanian atau petani adalah bagaimana memproduksi hasil pertanian yang memenuhi standar mutu, kontinuitas pasokan yang terjamin serta dalam skala kuantitas yang memenuhi permintaan pelanggan. Terpenuhinya syarat pemasaran tersebut, akan meningkatkan daya saing dari suatu produk pertanian akan lebih baik.

Banyaknya tantangan yang harus dihadapi, tentunya masih ada peluang yang dapat dimanfaatkan. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup lebih sehat, berdampak pada peningkatan permintaan produk pangan yang aman dan sehat. Hal ini mengindikasikan masih adanya peluang meningkatnya permintaan produk pertanian di pasar domestik yang diikuti dengan permintaan keragaman/variasi dan keamanan produk pertanian sehingga akan membuka peluang diversifikasi produk. Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian dituntut dapat berdaya saing dan bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing di pasar internasional, baik produk segar maupun olahan.

Berbagai keterbatasan terkait potensi sumber daya alam yang ada di DIY, memerlukan langkah strategis yang harus diupayakan untuk mendorong tercapainya peningkatan populasi, produktifitas dan mutu produk yang memadai sehingga daya saing produk memenuhi permintaan pasar.

Disamping itu, hal terpenting dalam merevitalisasi sektor pertanian untuk memperkuat daya saing produk pertanian adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM (sumberdaya manusia) dan meningkatkan kelembagaan sektor pertanian. Kualitas SDM sektor pertanian yang kurang memadai menjadi persoalan yang harus ditangani secara berkelanjutan melalui pelatihan yang kontinu, penguatan jiwa kewirausahaan,

pendampingan dan pengawalan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan pertanian perlu didukung dengan permodalan yang mudah dijangkau, program fasilitasi sarana dan prasaranayang tepat, pemberdayaan petani muda bermental wirausaha, pemberdayaan wanita tani, pelatihan, ketersediaan informasi pertanian yang memadai, penggunaan teknologi yang aplikatif, dan sistem jejaring pemasaran yang tepat.

Penguatan kelembagaan pertanian harus seiring dengan pola pendampingan berupa penyuluhan dan fasilitasi yang memadai. Dukungan penyuluhan yang memadai menjadi salah satu prioritas yang mendukung penguatan SDM dan kelembagaan pertanian melalui penguatan sumber daya penyuluh, baik penyuluh PNS, TH-TBPP, maupun penyuluh swadaya. Keberhasilan penyuluh dalam kegiatan pembinaan, pengawalan, dan pendampingan secara berkelanjutan menjadi salah satu kunci sukses dalam menggerakkan sektor pertanian menuju arah yang lebih baik menuju peningkatan daya saing.

## BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Selama periode 2014-2017, struktur perekonomian di DIY didominasi oleh tiga besar sektor lapangan usaha yaitu sektor industri pengolahan; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang masing-masing menyumbang pada PDRB diatas 10%. Selama kurun waktu tersebut, sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) mengalami fluktuasi karena ketidakstabilan harga biaya produksi pertanian serta menurunnya luas lahan pertanian (konversi). Tahun 2015, sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) berdasarkan atas harga yang berlaku diketahui menyumbang pada PDRB sebesar 9,00%, kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 9,12% dan terus menurun hingga tahun 2017 menjadi 8,93%, dengan demikian sektor pertanian memegang peranan cukup penting dalam perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan sektor pertanian merupakan *Resource Based* yang mampu menyerap dan memperluas kesempatan usaha/lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Beberapa permasalahan dalam pembangunan pertanian dan ketahanan pangan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan antara lain:

1. Terbatasnya lahan pertanian akibat adanya alih fungsi lahan;
2. Degradasi lahan karena penurunan kualitas tanah akibat perubahan lingkungan biofisik dan kerusakan alam;
3. Sempitnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian sehingga usaha tani tidak efisien;
4. Tingginya harga input pertanian;
5. Belum optimalnya produksi, produktivitas, dan mutu produk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan;
6. Rendahnya nilai tambah dan daya saing pengolahan hasil produk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.
7. Terbatasnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani;

8. Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian;
9. Belum optimalnya penggunaan dan penyebaran benih bersertifikat;
10. Rendahnya daya saing produk-produk pertanian terhadap produk impor;
11. Semakin menurunnya minat generasi muda untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian;
12. Tingginya penggunaan pestisida kimia pada beberapa komoditas pertanian;
13. Kurang berkembangnya industri pengolahan hasil, pemasaran hasil dan jasa alat mesin pertanian;
14. Belum optimalnya pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan pertanian;
15. Rendahnya stabilitas harga pangan;
16. Belum optimalnya kelembagaan petani;
17. Rendahnya pendapatan keluarga tani dari sektor pertanian;
18. Kurangnya jumlah SDM di sektor pertanian;
19. Adanya ancaman wabah Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS);
20. Belum optimalnya pendampingan dan pengawalan program dan kegiatan karena keterbatasan SDM, termasuk penyuluh;
21. Belum optimalnya upaya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan pada musim panen dan paceklik;
22. Ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras masih cukup tinggi;
23. Belum optimalnya Skor PPH (Pola Pangan Harapan) masyarakat DIY;
24. Masih terdapat desa rawan pangan di DIY;
25. Pengawasan pangan yang beredar belum menyeluruh;

### **3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur DIY yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yang nantinya RPJMN 2015-2019 menjadi pedoman bagi RPJMD DIY 2017-2022 untuk diselaraskan dan disinergikan dalam mendukung pencapaian tujuan nasional.

Visi pembangunan RPJMD DIY yang ingin diwujudkan pada periode 2017-2022 adalah *“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”*. Kemuliaan

martabat manusia Jogja dalam visi Gubernur DIY digambarkan dalam **“Lima Kemuliaan”** atau **“Panca Mulia”** yakni:

- 1) Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia Jogja yang berdaya saing,
- 2) Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat, serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal (keunikan teritori ekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,
- 3) Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan, dan kebersamaan,
- 4) Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan
- 5) Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Visi tersebut kemudian diselaraskan dengan data-data maupun analisa teknokratik untuk dapat dicapai melalui upaya yang tergambar dalam misi. Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi diharapkan dapat membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.

Rumusan misi Gubernur DIY dalam RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah di DIY. **Panca Mulia** dari Visi Gubernur DIY kemudian dirumuskan kedalam Misi pembangunan DIY tahun 2017–2022 sebagai berikut:

- 1) ***Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban;***

Rumusan misi ini mengakomodir substansi Panca Mulia 1,2 dan 3.

- 2) ***Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis.***

Rumusan misi ini mengakomodir substansi Panca Mulia 4, dan 5.

Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan sesuai dengan RPJMD masuk dalam misi pertama yaitu “*Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban*” dengan tujuan “*Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta*”. Sasaran Pemda yang akan didukung adalah 1) meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan melalui Program Pengembangan Sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan, Jasa), 2) meningkatnya derajat kualitas SDM melalui Program Peningkatan Usia Harapan Hidup, 3) meningkatnya derajat ekonomi masyarakat melalui Program Penanggulangan Kemiskinan.

### 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota

Kementerian Pertanian Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/HK.140/4/2015 tanggal 6 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015–2019. Dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Kementerian menetapkan sasaran strategis sebagai indikator kinerja. Sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula.

Langkah operasional untuk peningkatan produksi padi, jagung, kedelai adalah 1) peningkatan luas penanaman melalui pemanfaatan dan pencetakan lahan baku sawah baru, optimalisasi lahan, penambahan lahan kering untuk kedelai dan jagung serta untuk produk pertanian lainnya, peningkatan indeks pertanaman (IP), pemanfaatan lahan terlantar, dan penerapan pola tumpangsari, serta 2) Peningkatan produktivitas melalui penerapan pengelolaan tanaman terpadu padi, jagung dan kedelai; penyediaan benih unggul padi dan jagung; subsidi dan penyediaan pupuk; bantuan pengelolaan pupuk organik sekitar; pembangunan desa mandiri benih; pemberdayaan penangkar benih; bantuan alat dan mesin pertanian; pengembangan jaringan dan optimalisasi air untuk; dukungan peralatan pasca panen; penerapan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; peningkatan kapasitas teknis pertanian; penerapan pengendalian hama dan penyakit; revitalisasi penggilingan padi sekitar; pemanfaatan kalender tanam; dukungan *science* dan *agro techno park* di daerah sentra produksi; serta penguatan kelembagaan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K).

## 2. Peningkatan diversifikasi pangan.

Tercapainya peningkatan kualitas konsumsi pangan dengan indikator Skor PPH, terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, dan peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga menjadi prioritas utama nasional Kementerian Pertanian di bidang pangan. Salah satu sasaran strategis dalam Renstra Kementerian Pertanian adalah peningkatan diversifikasi pangan. Untuk mendukung diversifikasi pangan dari sisi konsumsi yang dilakukan melalui penganekaragaman konsumsi pangan sesuai kaidah pola pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), diperlukan dukungan dari sisi ketersediaan. Selain diversifikasi ketersediaan pangan pokok/karbohidrat sebagai sumber energi, ketersediaan pangan hewani sebagai sumber protein masih perlu ditingkatkan.

Langkah operasional yang akan dilakukan untuk mencapai peningkatan produksi daging antara lain peningkatan populasi dan produktivitas ternak sapi lokal, pengembangan pakan ternak, penyediaan bibit sapi/kerbau, kesehatan hewan, kesmavet, pasca panen dan pemasaran, serta perlu adanya regulasi pemerintah berupa Perda pemotongan betina produktif, regulasi impor ternak dan daging, penyediaan fasilitas skim kredit, serta pengaturan stok sapi. Diversifikasi pangan tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pangan masyarakat. Diversifikasi pangan dilaksanakan dengan langkah peningkatan cadangan pangan masyarakat, peningkatan penanganan krisis dan kerawanan pangan, peningkatan keanekaragaman konsumsi pangan dan gizi, peningkatan kualitas distribusi pangan masyarakat.

## 3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.

Sasaran peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah berkembangnya agroindustri terutama di pedesaan dari produk-produk unggulan hasil pertanian serta meningkatnya jumlah sertifikasi produk pertanian, dengan sasaran akhir meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian. Hal ini memerlukan upaya yang dapat dilakukan meliputi kesiapan hulu dan budidaya pertanian, peningkatan nilai tambah melalui pengolahan, penguasaan pasar domestik dalam rangka substitusi impor, seta peningkatan ekspor.

Sasaran pokok dalam pembangunan komoditas perkebunan adalah peningkatan produksi pada komoditas perkebunan andalan dan prospektif dan peningkatan kedaulatan pangan. Pemerintah daerah didorong untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan komoditas spesifik dan potensial di wilayahnya masing-masing. Strategi pengembangan komoditas unggulan perlu ditekankan, diintensifkan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pasca panen, efisiensi biaya produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, pemberdayaan petani perkebunan dengan fokus pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah perlu dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan agar terwujud komoditas unggulan nasional yang berkualitas, tangguh dan mampu bersaing. Selain itu aspek penyuluhan akan memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan inovasi petani perkebunan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan, penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk: (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumberdaya perkebunan secara optimal, bertanggungjawab dan lestari; dan (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.

Sasaran penyediaan dan peningkatan bahan baku bioindustri dan bioenergi adalah memenuhi kebutuhan bahan baku untuk industri dan energi terbarukan komoditas pertanian. Langkah operasional penyediaan dan peningkatan bahan baku energi meliputi penyediaan bahan baku industri dan penyediaan bahan baku bioenergi.

5. Peningkatan pendapatan keluarga petani.

Peningkatan kesejahteraan petani merupakan sasaran akhir dari pembangunan pertanian secara menyeluruh. Oleh karena itu kebijakan dan program peningkatan kesejahteraan petani merupakan *resultante* dari kebijakan dan program yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Langkah operasional untuk mencapainya

adalah melalui peningkatan produksi, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta peningkatan penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.

6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Rencana Strategis sektor pertanian di Kabupaten/Kota Tahun 2017-2022 memiliki tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah SKPD. Secara garis besar tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Pangan Kabupaten/Kota adalah (1) meningkatkan ketersediaan dan mutu pangan, (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian, dan (3) meningkatkan daya saing produk pertanian. Adapun sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Pangan Kabupaten/Kota (1) peningkatan ketersediaan dan mutu pangan, (2) peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian, dan (3) peningkatan daya saing produk pertanian. Strategi dan Arah kebijakan sektor pertanian di kabupaten/kota secara garis besar adalah (1) mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan, (2) mengembangkan penganekaragaman pangan, pengawasan mutu dan keamanan pangan, (3) meningkatkan nilai ekonomis hasil pertanian dan perikanan dalam rangka meningkatkan daya saing, (4) mengikutsertakan personil dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pertanian, dan (5) mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Sementara, terkait dengan urusan pangan, dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul Renstra periode 2016-2021 tujuan ke-2 adalah peningkatan ketahanan pangan, dengan sasaran: (1) terwujudnya pengembangan lumbung cadangan pangan dan desa mandiri pangan dan (2) distribusi dan harga bahan pangan. Salah satu indikatornya adalah skor PPH. Kabupaten Bantul melalui Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan dalam Renstra periode 2016-2021 menetapkan sasaran strategis: (1) peningkatan cakupan pangan dan kualitas gizi yang berimbang, dan (2) meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya produk.

Renstra periode 2017-2022 Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman memuat sasaran strategis peningkatan ketahanan pangan untuk mewujudkan tujuan meningkatkan daya saing sektor pertanian dan perikanan. Kabupaten Kulonprogo pada periode yang sama, melalui Dinas Pertanian dan Pangan memiliki tujuan terwujudnya peningkatan ketahanan pangan dengan sasaran meningkatnya diversifikasi

pangan, sedangkan sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta adalah meningkatkan ketersediaan dan mutu pangan.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2017-2022 berkedudukan sebagai kerangka dasar manajemen pembangunan sektor pertanian di DIY yang mencerminkan aspirasi masyarakat pertanian, dipadukan dengan *top down policy* dari Pemerintah Pusat, dan penjabaran dari amanat RPJMD dan RPJPD DIY, sehingga dalam penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY mengacu pada dokumen perencanaan berikut ini:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2017-2022;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY merupakan hasil integrasi dari dokumen perencanaan pembangunan di tingkat pusat maupun regional sektor pertanian. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY inilah yang akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan sektor pertanian di DIY selama rentang waktu 2017-2022 hingga di tingkat kabupaten/kota.

### **3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penyusunan RPJMD DIY 2017-2022 berpedoman pada Peraturan Daerah DIY Nomor: 2 Tahun tentang RTRW DIY 2009-2029 dan dokumen Raperda Review RTRW DIY. Rencana kawasan budidaya untuk kawasan peruntukan pertanian memiliki arah pemanfaatan ruang untuk mempertahankan luasan kawasan pertanian lahan basah dan lahan kering serta untuk meningkatkan prasarana dan sarana pendukung di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul.

Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pertanian yaitu:

1. Pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah dengan:
  - a. Melestarikan kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan,

menjaga ketersediaan lapangan kerja di bidang pertanian, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup;

- b. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian; dan
  - c. Pemanfaatan lahan untuk pembangunan diluar sektor pertanian diarahkan pada lahan pertanian yang telah dikonversi sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang.
2. Pada kawasan pertanian lahan kering dengan:
- a. Melestarikan kawasan pertanian lahan kering sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi;
  - b. Mengembangkan kawasan pertanian lahan kering untuk diversifikasi sumber pangan, dan sumber energi serta untuk menciptakan peluang ekonomi;
  - c. Mengoptimalkan produktifitas kawasan pertanian lahan kering;
  - d. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, kecuali untuk kepentingan umum;
  - e. Pemanfaatan lahan untuk pembangunan diarahkan pada lahan pertanian yang telah dikonversi sesuai dengan Rencana Rinci Tata Ruang.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan tersebut antara lain:

1. Pada kawasan pertanian lahan basah dengan:
  - a. Mempertahankan luasan kawasan pertanian lahan basah;
  - b. Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung.
2. Pada kawasan pertanian lahan kering dengan:
  - a. Mempertahankan luasan kawasan pertanian lahan kering; dan
  - b. Meningkatkan prasarana dan sarana pendukung.

Arahan penetapan kawasan pertanian sebagai berikut:

1. Penetapan kawasan pertanian lahan basah terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman; dan
2. Penetapan kawasan pertanian lahan kering terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman.

Sesuai rencana pentahapan pemanfaatan struktur ruang berdasarkan pemanfaatan ruang kawasan pertanian dalam RPJMD 2017-2022 yaitu:

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian
2. Peningkatan dan perbaikan sistem irigasi

3. Penetapan LP2B
4. Pemberian insentif bagi pemilik LP2B
5. Intensifikasi pertanian
6. Pembangunan pusat perbenihan
7. Rehabilitasi lahan pertanian yang sudah terdegradasi

Pengelolaan kawasan peruntukan pertanian yaitu pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah dan lahan kering dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada kawasan peruntukan pertanian lahan basah:
  - a. Mengembangkan budidaya pertanian tanaman pangan di lahan sawah beririgasi untuk fungsi keamanan dan ketahanan pangan wilayah;
  - b. Membina dan mengawasi pengendalian dan pelestarian lahan sawah beririgasi menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah;
  - c. Membina dan mengawasi pencegahan terjadinya alih fungsi lahan sawah ke fungsi non sawah;
  - d. Memelihara dan mengembangkan jaringan irigasi;
  - e. Mengawasi dan membina pengembangan budi daya ternak ruminansia dan unggas.
2. Pada kawasan peruntukan pertanian lahan kering :
  - a. Membina dan mengawasi pengembangan budi daya komoditas unggulan di lahan kering;
  - b. Membina dan mengawasi pengembangan pola budi daya lahan kering yang produktif dan konservatif;
  - c. Membina dan mengawasi diversifikasi komoditas;
  - d. Membina dan mengawasi intensifikasi lahan pekarangan;
  - e. Membina dan mengawasi pengembangan budi daya ternak ruminansia dan unggas;
  - f. Membina dan mengawasi pengelolaan kawasan terbuka hijau di perkotaan;
  - g. Membina dan mengawasi pengendalian konversi lahan kering.

Perubahan iklim dan degradasi lahan menjadi isu strategis terkait kajian lingkungan hidup yang berdampak langsung bagi masyarakat luas terutama masyarakat pedesaan yang kegiatan utamanya pada sektor pertanian. Menurunnya daya dukung sumber daya alam mengakibatkan degradasi lahan yang diantaranya akibat intensifikasi

pertanian yang mengharuskan adanya peningkatan produksi menyebabkan petani tergantung pada pupuk anorganik.

Degradasi fungsi lahan pada daerah resapan air akibat adanya penurunan kerapatan vegetasi dan menyebabkan air hujan kurang efektif terserap tanah sehingga berpotensi menurunkan debit air sungai. Berkurangnya debit air sungai mengakibatkan konsentrasi zat pencemar meningkat meskipun volume zat pencemar relatif tetap. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan pada sektor pertanian masih banyak sehingga mempengaruhi penurunan kualitas air sungai.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang dirumuskan tidak hanya didasarkan pada tinjauan kesenjangan pelayanan hasil identifikasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY mengenai faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, tetapi juga berdasarkan berbagai faktor dari pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY ditinjau dari:

1. Tugas dan fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Pertanian;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi Pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
5. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

Hasil telaah terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah, Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka diperoleh beberapa isu strategis yang mendesak untuk ditangani yaitu:

1. Penanganan tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian;
2. Penanganan degradasi lahan dan kerusakan lingkungan;
3. Upaya peningkatan produksi masih rentan terhadap pencemaran, kerusakan, risiko bencana alam dan perubahan iklim;

4. Belum optimalnya mekanisasi pertanian sebagai sarana mengefektifkan dan mengefisienkan usaha tani;
5. Lemahnya kelembagaan petani yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani;
6. Kurangnya pemenuhan standar mutu hasil, industri pengolahan dan perluasan pemasaran hasil pertanian;
7. Lemahnya akses petani terhadap permodalan;
8. Harga produk pertanian yang fluktuatif akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai pemasaran produk pertanian;
9. Pengelolaan usaha tani yang berorientasi pada pasar regional dan internasional;
10. Kurangnya peran generasi muda dan kelembagaan pertanian terutama Gapoktan, Kelompok Tani, UPJA, penangkar dan produsen benih, kelompok pengolahan hasil, serta P3A/GP3A/IP3A;
11. Kurangnya jalinan kemitraan agribisnis antara kelembagaan petani dengan mitra pemasaran;
12. Kurangnya daya dukung lahan pertanian melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, penerapan pola tanam yang tepat.
13. Kondisi kemiskinan yang dapat berlanjut pada kerawanan pangan.
14. Diversifikasi ketersediaan dan konsumsi pangan berkelanjutan.
15. Kondisi dan beban ganda keamanan pangan.
16. Peningkatan produksi komoditas perkebunan terutama pada komoditas tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, teh, tembakau, dan cengkeh.
17. Rendahnya nilai tambah dan daya saing produk perkebunan.
18. Pengembangan agrowisata teh, kopi dan kakao sebagai usaha pengintegrasian sektor perkebunan dengan sektor pariwisata untuk mendapatkan nilai tambah pada usaha perkebunan.

## BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2017-2022 dan analisis isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam kurun waktu 2017-2022 adalah:

**Tabel 4.1. Matrik Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran**

No	Visi (RPJMD)	Misi (RPJMD)	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Sasaran
1	Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja	Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban	Tumbuhnya perekonomian sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di DIY	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan populasi peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB ( <i>Sumber BPS</i> )
2			Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
3				Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan

Tabel 4.2. Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan (Renstra)	Sasaran (Renstra)	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Tumbuhnya perekonomian sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di DIY (Indikator: persentase peningkatan nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB dari tahun 2017 ke tahun 2022 sebesar 6,15%)	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) (Sumber BPS)	N/A	7.112.249	7.183.372	7.255.205	7.327.757
2	Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat (Indikator: persentase peningkatan Skor Pola Pangan Harapan dari tahun 2017 ke tahun 2022 sebesar 2,96%)	Terwujudnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	N/A	90,22	90,52	90,82	91,12
3		Pemenuhan pangan masyarakat	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan	N/A	40,29	39,74	39,19	38,65

Sasaran terwujudnya ketahanan pangan dengan indikatornya Skor PPH merupakan *goals* akhir dari ketahanan pangan yang menunjukkan keberhasilan kinerja sub sistem ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan. Skor PPH semakin tinggi menunjukkan kualitas konsumsi yang semakin baik, akan berdampak positif pada kesehatan, peningkatan usia harapan hidup, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sasaran pemenuhan pangan masyarakat menggunakan indikator persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan. Seperti yang diungkapkan

Ernest Engel (Hukum Engel) bahwa persentase pengeluaran untuk makanan/pangan akan menurun dengan meningkatnya pendapatan. Proporsi antara pengeluaran makanan dan non makanan dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga. Semakin tinggi pangsa pengeluaran pangan suatu rumah tangga, rumah tangga tersebut semakin rawan pangan (Melgar-Quinonez et.al., 2006)<sup>1</sup>. Menurut Soekirman (2000)<sup>2</sup>, rumah tangga dengan proporsi pengeluaran pangan  $\geq 60\%$  dapat dikategorikan rawan pangan. Melalui upaya mendekatkan akses pangan dan kegiatan ekonomi produktif di daerah rawan pangan diharapkan pendapatan masyarakat semakin meningkat dan kesejahteraannya semakin baik, sehingga dapat mengatasi kerawanan pangan sekaligus mendukung pengentasan

---

<sup>1</sup> Melgar-Quinonez, HR, AC Zubieta, B Mknelly, A Nteziyaremye, MFD Gerardo & C Dunford, 2006, "Household Food Insecurity and Food Expenditure in Bolivia, Burkina Faso, and the Philippines", J Nutr 2006;136:1431S-1437S.

<sup>2</sup> Soekirman. 2000. "Ilmu Gizi dan Aplikasinya untuk Keluarga dan Masyarakat". Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.

## BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Telaah identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD Dinas Pertanian DIY, BKPP DIY, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan DIY pada pencapaian tujuan Renstra periode 2017-2022 merupakan input untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan periode 2017-2022 adalah sebagai berikut:

### A. Faktor Penghambat

1. Angka kemiskinan di DIY khususnya di beberapa wilayah masih cukup tinggi yang sebagian besar merupakan masyarakat petani.
2. Keterbatasan kapasitas SDM pertanian, hal ini ditunjukkan dengan hasil sensus pertanian tahun 2013 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah rumah tangga pertanian sebesar 13,75% dibandingkan dengan data sensus pertanian pada tahun 2003. Sebesar 47,91% penduduk DIY merupakan rumah tangga petani dengan kelompok umur di atas 55 tahun dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan kemampuan tenaga kerja di sektor pertanian relatif rendah dibandingkan sektor lainnya.
3. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian relatif tinggi karena meningkatnya kebutuhan akan ruang untuk pemukiman dan sarana pendukung serta upaya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan masih belum optimal.
4. Dibukanya pasar bebas (*free trade*) yang tidak disertai dengan peningkatan ilmu, teknologi dan kemampuan tenaga kerja di sektor pertanian.

### B. Faktor Pendorong

1. Tersedia banyak peluang promosi produk pertanian melalui pameran dan berbagai expo;
2. Petani DIY sangat apresiatif terhadap pelayanan OPD Pertanian baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga proses pemandirian petani lebih mudah dilaksanakan;
3. Petani mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu memaksimalkan manfaat setiap fasilitas dari OPD Pertanian DIY;

4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengakses data dan informasi dari OPD Pertanian DIY;
5. Terjalannya kerjasama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dalam hal pengembangan sistem informasi dan jaringan;
6. Mudah nya koordinasi dengan mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan;
7. Adanya kerjasama dan terjadinya transfer ilmu dengan mitra kerja, termasuk dengan akademisi dan aparatur penelitian dan pengembangan;
8. Dukungan Pemerintah Pusat yang cukup signifikan dalam bentuk pendanaan Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan APBN.

Tujuan dan sasaran yang sebagaimana diuraikan di atas akan dapat dicapai bila faktor penghambat dapat diminimalisir dan faktor pendorong ditingkatkan sehingga akan terbangun kerangka strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengamankan produksi komoditas utama dan unggulan daerah;
2. Meningkatkan mutu produk tanaman pangan hortikultura berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan;
3. Menguatkan kelembagaan petani dan memberdayakan petani dalam melakukan agribisnis produk unggul pertanian untuk meningkatkan akses petani terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM petani;
4. Meningkatkan penggunaan aplikasi teknologi pertanian oleh masyarakat;
5. Mengembangkan potensi ternak lokal;
6. Mengembangkan kawasan berbasis komoditas unggulan;
7. Membangun sentra-sentra pembibitan ternak lokal;
8. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
9. Mengembangkan teknologi produksi pertanian domestik melalui penerapan *Good Agriculture Practices (GAP)/Standard Operating Procedure (SOP)*;
10. Mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), mengendalikan penyakit hewan menular strategis dan menangani dampak bencana alam dan perubahan iklim untuk mengamankan produksi pertanian;
11. Menyediakan sarana prasarana (pupuk, benih, bahan pengendalian OPT, alsintan, sumber daya air, dan permodalan);
12. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui penerapan *Good Handling Practices (GHP), Good Manufacturing Practices (GMP), Good Distribution Practices (GDP)* dan *Good Marketing/Retail Practices (GRP)*;

13. Mempromosikan dan memasarkan produk pertanian di pasar domestik maupun internasional;
14. Melindungi petani melalui regulasi subsidi harga produk;
15. Memfasilitasi prasarana dan sarana penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
16. Menumbuhkembangkan minat generasi muda bekerja di sektor pertanian melalui penumbuhan wirausahawan muda pertanian, pemberian modal usaha bagi generasi muda yang bergerak di sektor pertanian, pendidikan dan latihan khusus pertanian/agribisnis pertanian bagi generasi muda;
17. Mengembangkan kemitraan antar poktan/gapoktan/lembaga petani dengan pihak ketiga dalam membangun rantai pasokan (*supply chain management*);

Penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan dirumuskan, dianalisis dengan analisis SWOT memperhatikan dan menilai dari faktor internal (aspek kekuatan dan kelemahan) serta faktor eksternal (aspek peluang dan ancaman). Analisis faktor internal dan eksternal ini bertujuan untuk memetakan kekuatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY untuk diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan serta mengenali dan memahami kelemahan dan kekurangan agar dapat diminimalisir dan dieliminir dampak yang timbulkan, sedangkan analisis faktor eksternal untuk memetakan peluang dan ancaman yang akan dihadapi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY.

## A. Faktor Internal

### 1. Kekuatan (*Strenghts*)

- a. Tugas dan fungsi OPD Pertanian DIY secara substantif adalah memberikan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat pertanian melalui perbaikan pendapatan, peningkatan produktivitas efisiensi, pemberdayaan dan pemandirian petani;
- b. Adanya urusan wajib dan pilihan menyebabkan aparatur OPD Pertanian DIY tidak membedakan kualitas penanganan terhadap berbagai permasalahan pada sektor pertanian;
- c. Koordinasi rutin internal dengan instansi terkait kedinasan;
- d. OPD Pertanian DIY cukup responsif terhadap kebutuhan petani;
- e. Pendidikan SDM OPD Pertanian DIY yang tinggi dengan pengalaman yang mumpuni;
- f. Sistem jaringan dan informasi OPD Pertanian DIY yang memadai dalam hal penyediaan layanan data dan informasi;

- g. Tersedia banyak peluang promosi produk pertanian melalui pameran dan berbagai expo;
- h. Tersedia insentif bagi peningkatan kualitas SDM melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, magang dan kunjungan ke luar negeri.

## 2. Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Keterbatasan kapasitas SDM pertanian, hal ini ditunjukkan dengan hasil sensus pertanian tahun 2013 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah rumah tangga pertanian sebesar 13,75% dibandingkan dengan data sensus pertanian pada tahun 2003. Sebesar 47,91% penduduk DIY merupakan rumah tangga petani dengan kelompok umur di atas 55 tahun dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah, dan kemampuan tenaga kerja di sektor pertanian relatif rendah dibandingkan sektor lainnya.
- b. Keterbatasan lahan dan tingginya laju alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian produktif terbukti selama tahun 2013-2016 lahan sawah di DIY mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,13% per tahun atau 416 Ha/tahun.

## B. Faktor Eksternal

### 1. Peluang (*Opportunities*)

- a. Petani DIY sangat apresiatif terhadap pelayanan OPD Pertanian baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga proses pemandirian petani lebih mudah dilaksanakan;
- b. Petani mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu memaksimalkan manfaat setiap fasilitas dari OPD Pertanian DIY;
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengakses data dan informasi dari OPD Pertanian DIY;
- d. Terjalannya kerjasama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dalam hal pengembangan sistem informasi dan jaringan;
- e. Mudah nya koordinasi dengan mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan;
- f. Adanya kerjasama dan terjadinya transfer ilmu dengan mitra kerja, termasuk dengan akademisi dan aparaturnya penelitian dan pengembangan;
- g. Dukungan Pemerintah Pusat yang cukup signifikan dalam bentuk pendanaan Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan APBN.

## 2. Ancaman (*Threats*)

- a. Angka kemiskinan di DIY khususnya di beberapa wilayah masih cukup tinggi yang sebagian besar merupakan masyarakat petani.
- b. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Alih fungsi lahan pertanian relatif tinggi karena meningkatnya kebutuhan akan ruang untuk pemukiman dan sarana pendukung serta upaya perlindungan lahan pertanian berkelanjutan masih belum optimal. Produksi pangan yang semakin terbatas dapat memicu timbulnya kerawanan pangan.
- c. Dari hasil pemantauan 10 sungai di DIY tahun 2015, terdapat 5 sungai yang mengalami penurunan kualitas, dimana penurunan kualitas air sungai disebabkan antara lain karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan serta konversi lahan pertanian menjadi pemukiman dan kawasan perdagangan mengakibatkan peningkatan volume limbah dan sawah yang masuk ke sungai. Budidaya pertanian yang ramah lingkungan sudah diterapkan dalam pengelolaan pertanian antara lain melalui upaya budidaya pertanian organik.
- d. Dibukanya pasar bebas yang tidak disertai dengan peningkatan ilmu, teknologi dan kemampuan tenaga kerja di sektor pertanian.

Berdasarkan analisis SWOT dan kerangka strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yang akan menghasilkan seperangkat kebijakan yang selanjutnya akan dijabarkan dan disusun dalam program-program yang implementatif dan secara operasional diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang terukur. Adapun seperangkat kebijakan tersebut yaitu:

1. Peningkatan produksi tanaman dan populasi ternak yang berdampak bagi peningkatan pendapatan petani;
2. Peningkatan daya saing produk pertanian melalui standardisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan;
3. Pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana);
4. Pengembangan kawasan yang berdampak terhadap pendapatan petani;
5. Pengembangan sentra-sentra pembibitan ternak lokal;
6. Pendampingan dan pengawalan kelompok tani.
7. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh, pemantapan kelembagaan penyuluhan, dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan;
8. Pemantapan ketersediaan dan kewaspadaan pangan melalui koordinasi lintas sektor;
9. Peningkatan cadangan pangan daerah (masyarakat dan pemerintah);

10. Peningkatan diversifikasi/penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal;
11. Penanganan keamanan pangan, pengawasan pangan beredar, dan sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan;
12. Pengembangan distribusi pangan yang merata dan terjangkau, stabilisasi harga pangan strategis, dan pemantauan distribusi, harga, akses pangan;
13. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pusat Perbenihan;
14. Penurunan jumlah Desa Rawan Pangan;
15. Peningkatan aksesibilitas pangan masyarakat;
16. Pemenuhan kecukupan pangan masyarakat.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja</b>			
<b>MISI I : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Tumbuhnya perekonomian sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di DIY	Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan dan mengamankan produksi komoditas utama dan unggulan daerah;</li> <li>2. Meningkatkan mutu produk tanaman pangan hortikultura berbasis sumber daya lokal yang berkelanjutan;</li> <li>3. Memperkuat kelembagaan petani dan memberdayakan petani dalam melakukan agribisnis produk unggul pertanian untuk meningkatkan akses petani terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM petani;</li> <li>4. Meningkatkan penggunaan aplikasi teknologi pertanian oleh masyarakat;</li> <li>5. Mengembangkan potensi ternak lokal;</li> <li>6. Mengembangkan kawasan berbasis komoditas unggulan;</li> <li>7. Membangun sentra-sentra pembibitan ternak lokal;</li> <li>8. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan;</li> <li>9. Mengembangkan teknologi produksi pertanian domestik melalui penerapan <i>Good Agriculture Practices (GAP)/Standard Operating Procedure (SOP)</i>;</li> <li>10. Mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), mengendalikan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan produksi tanaman dan populasi ternak yang berdampak bagi peningkatan pendapatan petani;</li> <li>2. Peningkatan daya saing produk pertanian melalui standarisasi produk dan proses, peningkatan rantai pasok, mutu dan keamanan pangan;</li> <li>3. Pengembangan infrastruktur (lahan, air, sarana dan prasarana);</li> <li>4. Pengembangan kawasan yang berdampak terhadap pendapatan petani;</li> <li>5. Pengembangan sentra-sentra pembibitan ternak lokal;</li> <li>6. Pendampingan dan pengawalan kelompok.</li> <li>7. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh, pemantapan kelembagaan penyuluhan, dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan</li> </ol>

VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja			
MISI I : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>penyakit hewan menular strategis dan menangani dampak bencana alam dan perubahan iklim untuk mengamankan produksi pertanian;</p> <p>11. Menyediakan sarana prasarana (pupuk, benih, bahan pengendalian OPT, alsintan, sumber daya air, dan permodalan);</p> <p>12. Meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui penerapan <i>Good Handling Practices (GHP)</i>, <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i>, <i>Good Distribution Practices (GDP)</i> dan <i>Good Marketing/Retail Practices (GRP)</i>;</p> <p>13. Mempromosikan dan memasarkan produk pertanian di pasar domestik maupun internasional;</p> <p>14. Melindungi petani melalui regulasi subsidi harga produk;</p> <p>15. Memfasilitasi prasarana dan sarana penyediaan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);</p> <p>16. Menumbuhkembangkan minat generasi muda bekerja di sektor pertanian melalui penumbuhan wirausahawan muda pertanian, pemberian modal usaha bagi generasi muda yang bergerak di sektor pertanian, pendidikan dan latihan khusus pertanian/agribisnis pertanian bagi generasi muda;</p> <p>17. Mengembangkan kemitraan antar poktan/gapoktan/lembaga petani dengan pihak ketiga dalam membangun rantai pasokan (<i>supply chain management</i>);</p>	
Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat	Terwujudnya ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan, akses, konsumsi, dan keamanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemantapan ketersediaan dan kewaspadaan pangan melalui koordinasi lintas sektor</li> <li>2. Peningkatan cadangan pangan daerah (masyarakat dan pemerintah)</li> <li>3. Peningkatan diversifikasi/penganekaragaman pangan berbasis pangan lokal</li> <li>4. Penanganan keamanan pangan, pengawasan pangan beredar, dan sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan</li> <li>5. Pengembangan distribusi pangan yang merata dan terjangkau, stabilisasi harga pangan strategis, dan pemantauan</li> </ol>

<b>VISI : Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja</b>			
<b>MISI I : Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			distribusi, harga, akses pangan. 6. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pusat Perbenihan
	Pemenuhan pangan masyarakat	Pemberdayaan masyarakat di daerah rawan pangan	1. Penurunan jumlah Desa Rawan Pangan 2. Peningkatan aksesibilitas pangan masyarakat 3. Pemenuhan kecukupan pangan masyarakat

## **BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil dan indikator keluaran, dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY melaksanakan program yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian sebagai berikut:

1. Program Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan
4. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
5. Program Peningkatan Produksi Hortikultura
6. Program Peningkatan Populasi Peternakan
7. Program Peningkatan Produksi Perkebunan
8. Program Pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan
9. Program Pengembangan Perbenihan Pertanian
10. Program Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian
11. Program Perlindungan Tanaman Pertanian
12. Program Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewan
13. Program Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan
14. Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan

Pada periode Renstra 2017-2022 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY mengawal kegiatan strategis pemerintah daerah antara lain :

1. Penanganan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B)
2. Pengembangan Jogja Agro Techno Park
3. Pengembangan Kawasan Agro Ngipiksari

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY

No	Sasaran (Renstra)	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
1		Program Administrasi Perkantoran		N/A	100%	100%	100%	100%
2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		N/A	100%	100%	100%	100%
3		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		N/A	100%	100%	100%	100%
4		Program Peningkatan Pengembangan Sistem		N/A	100%	100%	100%	100%
5	Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Produksi tanaman pangan (ton)	N/A	2.312.780	2.313.050	2.313.255	2.313.500
6		Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi hortikultura (ton)	N/A	397.965	399.550	401.150	402.750
7		Peningkatan Populasi Peternakan	Populasi ternak (animal unit)	N/A	622.842	624.874	626.885	628.870
8		Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi perkebunan (ton)	N/A	68.877	69.015	69.153	69.290
		Pengembangan Perbenihan Pertanian	Persentase benih tanaman pangan dan hortikultura bersertifikat yang terdistribusi (%)	N/A	85	87	89	91

No	Sasaran (Renstra)	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program Pada Tahun Ke-				
				2018	2019	2020	2021	2022
9		Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian	Jumlah sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (ha)	N/A	600	700	800	900
10		Perlindungan Tanaman Pertanian	Persentase pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	N/A	95	95	95	95
11		Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewananan	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	N/A	92	94	96	98
12		Pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan	Tingkat pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian (nilai/skor)	N/A	73	74	75	76
13	Terwujudnya ketahanan pangan	Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi (%)	N/A	0,08	0,08	0,08	0,08
14	Pemenuhan pangan masyarakat	Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Jumlah desa rawan pangan (desa)	N/A	6	4	2	0

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan dalam Tabel 6.2 berikut ini:

Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Program Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD (%)	100%	N/A	N/A	100%	5.000.000	100%	5.000.000	100%	3.152.000	100%	3.374.000	100%	16.526.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jasa kebersihan kantor</li> <li>Surat kabar</li> <li>Majalah</li> <li>Surat keluar</li> <li>Surat masuk</li> <li>Jasa pembayaran telepon, listrik dan internet</li> <li>ATK</li> <li>Barang cetakan penggandaan dan penjilidan</li> <li>Jasa KIR, STNK kendaraan roda 2 (174 unit), roda 4 (25 unit), dan roda 6 (1 unit)</li> <li>Komponen instalasi listrik</li> <li>Pengelolaan naskah dinas</li> <li>Peralatan rumah tangga perkantoran</li> <li>Retribusi sampah</li> </ul>	N/A	N/A	- 1 tahun	1.942.000	- 1 tahun	1.942.000	- 1 tahun	1.225.000	- 1 tahun	1.400.000	- 1 tahun	6.509.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Honor pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian</li> <li>Jasa keamanan kantor</li> <li>Honorarium PTT</li> <li>Honor Petugas Kearsipan</li> <li>Honorarium Pengemudi</li> </ul>		N/A	N/A	- 23 org/bln	2.788.000	- 27 org/bln	2.788.000	- 27 org/bln	1.757.000	- 27 org/bln	1.780.000	- 27 org/bln	9.113.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Makan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan</li> <li>Konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan dalam daerah terlaksana dengan baik</li> </ul>		N/A	N/A	- 1 tahun (80 Kali)	270.000	- INDUK 1 tahun, 80 kali - BP3MBTP 1 tahun, 15 kali - BPPTDK 1 tahun, 15 kali	270.000	- INDUK 1 tahun, 50 kali - BP3MBTP 1 tahun, 9 kali - BPPTDK 1 tahun, 9 kali	170.000	- INDUK 1 tahun, 57 kali - BP3MBTP 1 tahun, 10 kali - BPPTDK 1 tahun, 10 kali	194.000	- 1 tahun (Induk 267 Kali, BP3MBTP 34 kali, BPPTDK 34 kali)	904.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsultasi dan koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam dan luar Jawa terlaksana dengan baik</li> </ul>	100%	N/A	N/A	100%	5.890.000	100%	6.000.000	100%	6.194.000	100%	6.623.000	100%	24.707.000	Dinas Pertanian &	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			an Sarana dan Prasarana Aparatur	Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi (%)														Ketahanan Pangan	
			Kegiatan pembangunan/rehabilitasi rumah dan gedung kantor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konstruksi gudang Unit Gesikan</li> <li>• Pagar UPTD BPBPTDK</li> <li>• Pembangunan Jalan Lingkungan Unit Gading</li> <li>• Perbaikan atap gedung PMHP Lantai 2</li> <li>• Rehab Gedung A</li> <li>• Rehab Screen House Unit Ngipiksari</li> <li>• Rehab Gedung A lanjutan (lantai bawah)</li> <li>• Rehab Gedung B</li> <li>• Rehab gedung C</li> <li>• Rehab kamar mandi asrama UPTD BPSDMP</li> <li>• Rehab kandang sapi UPTD BPTDK</li> <li>• Landscape tamanisasi</li> <li>• Rehab gedung BPSBP</li> </ul>		N/A	N/A	- 1 unit - 130 m - 1 unit	2.945.000		3.000.000		3.194.000		3.000.000	- 1 unit - 130 m - 1 unit - 1 paket - 1 paket - 1 unit - 1 paket - 1 paket - 1 paket	12.139.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan pengadaan peralatan dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kursi rapat</li> <li>• Kursi ruang tunggu (induk)</li> <li>• Access Point (BKPP)</li> </ul>		N/A	N/A	- 70 unit - 2 buah - 1 unit	442.000		450.000		450.000		450.000	- 70 unit - 2 buah - 1 unit	1.792.000	Dinas Pertanian & Ketahanan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			perlengkapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hub (BKPP)</li> <li>• Rak arsip, filling cabinet, interior kearsipan</li> <li>• AC (BPBPTDK)</li> <li>• Almari Arsip (BPBPTDK)</li> <li>• Filling Kabinet (BPBPTDK)</li> <li>• Komputer</li> <li>• Kursi Tunggu UPTD BPTP</li> <li>• Almari arsip UPTD BPTP</li> <li>• Mic Wireless (BKPP)</li> <li>• Sound system (Induk)</li> <li>• Perlengkapan ruang laktasi (AC, Almari Es, dispenser, wastafel, meja, kursi)</li> <li>• Kursi tamu Ruang Kepala Dinas</li> <li>• Komputer PC</li> <li>• Printer</li> <li>• Laptop</li> <li>• TV RR. Wijayakusuma</li> <li>• AC Gedung A</li> <li>• Meja Kerja</li> <li>• Kursi</li> <li>• Tempat tidur ruang laktasi</li> <li>• Kursi roda</li> <li>• Jaringan LAN</li> <li>• Water heater (UPTD BPSDMP)</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 unit</li> <li>- 1 paket</li> <li>- 2 unit</li> <li>- 1 unit</li> <li>- 1 buah</li> <li>- 2 unit</li> <li>- 2 buah</li> <li>- 2 unit</li> <li>- 1 unit</li> <li>- 1 unit</li> <li>- 1 paket</li> <li>- 1 unit</li> <li>- 2 unit</li> <li>- 2 unit</li> <li>- 3 unit</li> <li>- 1 unit</li> <li>- 6 unit</li> <li>- 20 unit</li> <li>- 20 unit</li> <li>- 1 unit</li> <li>- 1 unit</li> <li>1 paket</li> <li>19 unit</li> </ul>							<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 unit</li> <li>- 1 paket</li> <li>- 2 unit</li> <li>- 1 unit</li> <li>- 1 buah</li> <li>- 2 unit</li> <li>- 2 buah</li> <li>- 2 unit</li> <li>- 1 unit</li> <li>- 1 unit</li> <li>- 1 paket</li> <li>- 1 unit</li> <li>- 3 unit</li> <li>- 3 unit</li> <li>- 1 unit</li> <li>- 6 unit</li> <li>- 20 unit</li> <li>- 20 unit</li> <li>- 1 unit</li> <li>- 1 unit</li> </ul>	Pangan			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Meja kerja ruang rapat gedung C</li> <li>Kursi kerja gedung C</li> <li>Roll O pack (arsip)</li> <li>PC printer</li> <li>CCTV (induk)</li> <li>Rak surat kabar</li> <li>PC &amp; printer</li> <li>Laptop</li> <li>Meja Kerja</li> <li>Kursi</li> <li>Tempat tidur ruang laktasi</li> <li>Kursi roda</li> <li>CCTV</li> </ul>																
			Kegiatan Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan berkala gedung perkantoran</li> <li>Pemeliharaan jaringan listrik (Induk atau UPTD)</li> <li>Pengecatan pagar kantor (Induk atau UPTD)</li> </ul>		N/A	N/A	- 1 paket	540.000	- 1 paket	550.000	- 1 paket	550.000	- 1 paket	750.000	2.390.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY		
			Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan berkala peralatan gedung perkantoran</li> <li>Pemeliharaan berkala perlengkapan gedung perkantoran</li> </ul>		N/A	N/A	- 1 paket	690.000	- 1 paket	700.000	- 1 paket	700.000	- 1 paket	900.000	2.990.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY		
			Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemeliharaan berkala kendaraan dinas</li> </ul>		N/A	N/A	- 1 tahun	1.273.000	- 1 tahun	1.300.000	- 1 tahun	1.300.000	- 1 tahun	1.523.000	5.396.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			n Dinas/Operasional															Pangan	
			Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kualitas pegawai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		N/A	N/A	100%	45.000	100%	49.000	100%	49.000	100%	50.000	100%	193.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu	• Pembinaan dan penilaian angka kredit jabatan fungsional		N/A	N/A	- 1 tahun	45.000	- 1 tahun	49.000	- 1 tahun	49.000	- 1 tahun	50.000	1 tahun	193.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	Terwujudnya Penata Usahaan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi (%)	100%	N/A	N/A	100%	476.380	100%	500.000	100%	465.000	100%	508.000	100%	1.949.380	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja	Laporan kinerja instansi Pemerintah (LKJIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan		N/A	N/A	- Nilai LKJIP : A	24.000	- Nilai LKJIP : A	25.000	- Nilai LKJIP : A	25.000	- Nilai LKJIP : A	30.000	- Nilai LKJIP : A	104.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				(RPJMD, Renstra dan IKU)															
			Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan		N/A	N/A	Laporan keuangan devisasi 1%	105.000	Laporan keuangan devisasi 1%	110.000	Laporan keuangan devisasi 1%	120.000	Laporan keuangan devisasi 1%	130.000	Laporan keuangan devisasi 1%	465.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum Perencanaan OPD</li> <li>• RKT, Renja, RKA, DPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku</li> </ul>		N/A	N/A	- Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020  - Dokumen perencanaan SKPD TA 2020 dan Perubahan 2019	262.293	- Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2021  - Dokumen perencanaan OPD TA 2021 dan Perubahan 2020	260.000	- Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2022  - Dokumen perencanaan OPD TA 2022 dan Perubahan 2021	210.000	- Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2023  - Dokumen perencanaan OPD TA 2023 dan Perubahan 2022	233.000	- Kesesuaian perencanaan tahunan dengan tahap RPJMD tahun 2020-2023  - Dokumen perencanaan OPD TA 2020-2023 dan Perubahan 2019-2022	965.293	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	Realisasi penggunaan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan		N/A	N/A	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	85.087	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	105.000	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	110.000	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	115.000	Capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%	415.087	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY
Tumbuhnya perekonomian sub sektor	Meningkatnya produksi tanaman pangan,		Program Peningkatan Produksi Tanaman	Produksi tanaman pangan (ton)	2.204.717	N/A	N/A	2.312.780	11.000.000	2.313.050	8.000.000	2.313.255	3.841.000	2.313.500	4.091.000	2.313.500	26.932.000	Dinas Pertanian & Ketahanan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di DIY	hortikultura, perkebunan dan populasi peternakan		Pangan															Pangan	
			Kegiatan Budidaya Tanaman Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Draft Rapergub tindak lanjut Perda No.10 tahun 2011 tentang LP2B</li> <li>Luas lahan yang produktivitasnya meningkat</li> <li>sarana prasarana lahan air yang dapat berfungsi dengan baik</li> </ul>		N/A	N/A	1 Rapergub / Pergub	2.500.000	1 Rapergub / Pergub	5.400.000	1 Rapergub / Pergub	2.890.000	1 Rapergub / Pergub	2.985.000	5 Rapergub / Pergub	13.775.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY
						N/A	N/A	100 hektar (Pendam pingan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) ubikayu sebanyak 4 unit x 25 ha)		60 hektar (Pendam pingan PTT ubikayu sebanyak 4 unit x 15 ha)		60 hektar (Pendam pingan PTT ubikayu sebanyak 3 unit x 20 ha)		60 hektar (Pendam pingan PTT ubikayu sebanyak 3 unit x 20 ha)		280 hektar (Pendam pingan PTT ubikayu sebanyak 14 unit x 20 ha)			
						N/A	N/A	4 km (Kewenangan DIY 906,198 km; rusak parah 25 % = 225 km; rehab jaringan per tahun 10 km @25ha = 250 ha)		4 km		2 km		2 km		12 km			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				• sarana pertanian yang dapat dipenuhi		N/A	N/A	60 unit		36 unit		18 unit		18 unit		132 unit			
			Kegiatan Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan pemasaran hasil tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>jumlah sertifikat jaminan mutu hasil tanaman pangan</li> <li>Ketersediaan informasi harga komoditas tanaman pangan (beras, jagung, kedelai, ubi kayu, kacang hijau)</li> <li>Doksistu penerapan organik komoditas tanaman pangan</li> </ul>		N/A	N/A	1 sertifikat	80.000	-	100.000	-	110.000	-	115.000	1 sertifikat	405.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Operasional JATP	Operasional JATP	N/A	N/A	N/A	1 tahun	8.420.000	1 tahun	2.500.000	1 tahun	841.000	1 tahun	991.000	4 tahun	12.752.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
			Jogja Agro Techno Park	Pembangunan fisik JATP	N/A	N/A	N/A	1 tahun		1 tahun						2 tahun			
				Soft launching	N/A	N/A	N/A	1 kali								1 kali			
			Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Produksi tanaman hortikultura (ton)	392.421	N/A	N/A	397.965	3.000.000	399.550	3.200.000	401.150	3.655.000	402.750	2.837.000	402.750	12.692.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Budidaya Tanaman Hortikultura	• Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya hortikultura	n/a	N/A	N/A	231 ha	2.700.000	176 ha	2.900.000	203 ha	3.355.000	153 ha	2.537.000	763 ha	11.492.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas lahan yang diusahakan untuk biofarmaka</li> <li>Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya stroberi</li> <li>Pemeliharaan Obor Pangan Lestari (OPAL)</li> <li>Jumlah kebun yang teregistrasi dan survelen</li> </ul>	n/a	N/A	N/A	250 sertifikat			3 ha		3 ha		2 ha		8 ha		
			Kegiatan Standarisasi mutu produk pertanian dan pemasaran hasil hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah sertifikasi mutu hortikultura</li> <li>Ketersediaan informasi harga komoditas hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih, tomat)</li> </ul>		N/A	N/A	1 dokumen	300.000	1 dokumen	300.000	1 dokumen	300.000	1 dokumen	300.000	4 dokumen	1.200.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY
			Program Peningkatan Populasi Peternakan	Populasi ternak (animal unit)	620.516	N/A	N/A	622.842	3.000.000	624.874	3.200.000	626.885	4.200.000	628.870	3.200.000	628.870	13.600.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Budidaya Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>penambahan populasi ternak unggas (ayam / itik)</li> <li>penambahan populasi ternak kecil</li> </ul>		N/A	N/A	330 ekor	2.800.000	66 ekor	2.890.000	87 ekor	3.850.000	65 ekor	2.875.000	548 ekor	12.415.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY
						N/A	N/A	144 ekor bligon 24		27 ekor bligon 5		71 ekor bligon 13		27 ekor bligon 5		269 ekor bligon 47			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				(kambing domba) • penambahan populasi ternak besar (sapi perah/potong) • Jumlah barang atau sarana prasarana dukungan terhadap optimalisasi reproduksi melalui Inseminasi Buatan (IB) dengan angka Service per Conception (S/C) sebesar 2 kali  • Penambahan populasi ternak ayam buras • Pengembangan pakan komplet ruminansia		N/A	N/A	PE 120 ekor		PE 23 ekor		PE 30 ekor		PE 23 ekor		PE 196 ekor			
						N/A	N/A	(N2 cair 2.000 liter, semen beku 5.500 dosis, plastik sheath 10.000 buah dan plastik gloves 10.000 buah)		(N2 cair 380 liter, semen beku 1.140 dosis, plastik sheath 1.140 buah dan plastik gloves 1.140 buah)		(N2 cair 760 liter, semen beku 2.280 dosis, plastik sheath 2.280 buah dan plastik gloves 2.280 buah)		(N2 cair 380 liter, semen beku 1.140 dosis, plastik sheath 1.140 buah dan plastik gloves 1.140 buah)		(N2 cair 3.520 liter, semen beku 7.780 dosis, plastik sheath 14.560 buah dan plastik gloves 14.560 buah)			
						N/A	N/A	N/A		1.000 ekor		1.300 ekor		900 ekor		3.200 ekor			
						N/A	N/A	N/A		12 kelompok		10 kelompok		10 kelompok		32 kelompok			
			Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	• Jumlah obat dan vaksin yang difasilitasi • Pengawasan lalu lintas ternak		N/A	N/A	2.450 botol	200.000	1.250 botol	200.000	2.500 botol	225.000	1.250 botol	200.000	7.450 botol	825.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY
						N/A	N/A	5 lokasi		7 lokasi		7 lokasi		7 lokasi		7 lokasi			
			Kegiatan Pengamanan Produk Pangan Asal	• Jumlah sertifikat yang dihasilkan pada pelaksanaan		N/A	N/A	-	-	1 sertifikat	110.000	1 sertifikat	125.000	1 sertifikat	125.000	3 sertifikat	360.000	Dinas Pertanian & Ketahanan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Hewan	audit NKV terhadap unit usaha produk asal hewan yang telah memenuhi persyaratan • Ketersediaan informasi harga komoditas peternakan (daging sapi, daging kambing, daging ayam, telur)						4 komoditas		4 komoditas		4 komoditas		4 komoditas		Pangan	
			Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi perkebunan (ton)	68.602,97	N/A	N/A	- 68.877	2.000.000	- 69.015	2.300.000	- 69.153	3.132.000	- 69.290	2.281.000	- 69.290	9.713.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Budidaya Tanaman Perkebunan	• Budidaya tanaman perkebunan 4 komoditas (kopi, teh, tembakau dan kakao) • Pemeliharaan tanaman perkebunan (kopi, kakao, dan kelapa) 3 komoditas.		N/A	N/A	100 orang (22 hektar)	800.000	200 orang (190 hektar)	900.000	300 orang (290 hektar)	1.382.000	220 orang (210 hektar)	1.000.000	820 orang (712 hektar)	4.082.000	Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Bimtek pengolahan pasca panen Sertifikasi mutu produk perkebunan		N/A	N/A	270 orang (67,5 ha)	400.000	100 orang (20 ha)	450.000	186 orang (22 ha)	500.000	115 orang (23,5 ha)	531.000	671 orang (133 ha)	1.881.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
						N/A	N/A	3 kelompok (22,5 ha)		3 kelompok (22,5 ha)		5 kelompok (25 ha)		3 kelompok (25 ha)		14 kelompok (95 ha)			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Temu kemitraan pelaku usaha perkebunan		N/A	N/A	100 orang (25 ha)		40 orang (31,25 ha)		40 orang (31,25 ha)		50 orang (35 ha)		230 orang (122,5 ha)			
				Pengelolaan lahan dan air 2 komoditas (kopi dan kakao)		N/A	N/A	60 orang (15 hektar)		50 orang (15 hektar)		55 orang (16,5 hektar)		60 orang (18 hektar)		225 orang (64,5 hektar)			
				Penerapan standar mutu hasil perkebunan		N/A	N/A	-		2 komoditas		2 komoditas		2 komoditas		6 komoditas			
				Uji mutu komoditas perkebunan		N/A	N/A	-		2 kelompok		2 kelompok		2 kelompok		6 kelompok			
			Kegiatan Budidaya Tanaman Tembakau (Cukai)	Budidaya tanaman Tembakau sesuai GAP		N/A	N/A	50 orang (15 ha)	450.000	60 orang (18 ha)	550.000	80 orang (24 ha)	750.000	60 orang (18 ha)	550.000	250 orang (75 ha)	2.300.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
				Pengendalian hama terpadu komoditas tembakau dengan sistem sekolah lapang		N/A	N/A	50 orang (12 ha)		70 orang (15 ha)		100 orang (20 ha)		70 orang (15 ha)		290 orang (62 ha)			
				Bimbingan Teknis Pengelolaan alsintan		N/A	N/A	50 orang (15 hektar)		50 orang (15 hektar)		65 orang (20 hektar)		50 orang (15 hektar)		215 orang (65 hektar)			
				Bimbingan teknis Pengelolaan lahan dan air		N/A	N/A	50 orang (18 hektar)		80 orang (22 hektar)		100 orang (30 hektar)		80 orang (22 hektar)		310 orang (92 hektar)			
				Uji kadar Tar dan Nikotin tembakau di 3 kabupaten		N/A	N/A	3 kelompok (20 hektar)		3 kelompok (20 hektar)		4 kelompok (27 hektar)		3 kelompok (20 hektar)		13 kelompok (87 hektar)			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan Kelembagaan Petani Tembakau (Cukai)	Bimbingan teknis kelembagaan usaha petani tembakau  Temu kemitraan pelaku usaha tembakau		N/A	N/A	60 orang (15 ha)	350.000	30 orang (7,5 ha)	400.000	110 orang (28 ha)	500.000	30 orang (7,5 ha)	400.000	230 orang (58 ha)	1.650.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
			Program Pengembangan SDM pertanian dan Penyuluhan	Tingkat pengetahuan dan ektrampilan SDM pertanian (nilai/skor)		N/A	N/A	73	1.100.00	74	1.100.000	75	1.100.000	76	1.100.000	76	4.400.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Pelatihan SDM Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan teknis tanaman pangan</li> <li>• Pelatihan teknis hortikultura</li> </ul>		N/A	N/A	Terlatihnya teknis pertanian tanaman pangan bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik) 90 orang	800.000	Terlatihnya teknis pertanian tanaman pangan bagi petani dan petugas sebanyak 120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	800.000	Terlatihnya teknis pertanian tanaman pangan bagi petani dan petugas sebanyak 90 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	800.000	Terlatihnya teknis pertanian tanaman pangan bagi petani dan petugas sebanyak 90 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	800.000	Terlatihnya teknis pertanian tanaman pangan bagi petani dan petugas sebanyak 390 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	3.200.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan teknis peternakan</li> <li>• Pelatihan teknis perkebunan</li> </ul>		N/A	N/A	yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%		120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%		120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%		120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%		450 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan teknis peternakan</li> <li>• Pelatihan teknis perkebunan</li> </ul>		N/A	N/A	Terlatihnya teknis pertanian peternakan bagi petani dan petugas sebanyak 90 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%		120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%		120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%		120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%		450 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan teknis peternakan</li> <li>• Pelatihan teknis perkebunan</li> </ul>		N/A	N/A	Terlatihnya teknis pertanian perkebunan bagi petani dan petugas sebanyak 30 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%		120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%		120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%		120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%		210 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluh Pertanian	Programa Penyuluhan		N/A	N/A	1 tahun	300.000	1 tahun	1.200.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY						
				Temu Tugas Penyuluh		N/A		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		4 kali			
				Penilaian Klas Kelompok tani		N/A		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
			Program Pengembangan Perbenihan Pertanian	Persentase benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan bersertifikat yang terdistribusi (%)	N/A	N/A	N/A	85	2.500.000	87	2.700.000	89	1.198.000	91	1.296.000	91	7.694.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Produksi Benih Tanaman Pangan	Produksi benih tanaman pangan	N/A	N/A	N/A	Produksi benih sumber padi 71.500 kg, jagung 5.000 kg, kedelai 4.075 kg, kacang tanah 700 kg, dan kacang hijau 700 kg.	1.545.000	Produksi benih sumber padi 71.500 kg, jagung 5.000 kg, kedelai 4.075 kg, kacang tanah 700 kg, dan kacang hijau 700 kg.	1.734.000	Produksi benih sumber padi 36.350 kg, jagung 2.500 kg, kedelai 1.800 kg, kacang tanah 700 kg, dan kacang hijau 700 kg.	770.000	Produksi benih sumber padi 40.000 kg, jagung 2.500 kg, kedelai 1.800 kg, kacang tanah 700 kg, dan kacang hijau 700 kg.	833.500	Produksi benih sumber padi 219.350 kg, jagung 15.000 kg, kedelai 11.750 kg, kacang tanah 2.800 kg, dan kacang hijau 2.800 kg.	4.882.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Produksi benih tanaman hortikultura	Produksi benih tanaman hortikultura	N/A	N/A	N/A	Produksi benih cabai 35 kg, benih tomat 35 kg, benih jamur	570.000	Produksi benih cabai 35 kg, benih tomat 35 kg, benih jamur	501.000	Produksi benih cabai 35 kg, benih tomat 35 kg, benih jamur	222.000	Produksi benih cabai 35 kg, benih tomat 35 kg, benih jamur	240.000	Produksi benih cabai 140 kg, benih tomat 140 kg, benih	1.533.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
								edibel 8.000 botol, bibit tanaman buah 5.000 batang, bibit tanaman hias 2.000 batang, benih hasil pemurnian cabai 250 gram dan tomat 250 gram.		edibel 9.000 botol, bibit tanaman buah 7.000 batang, bibit tanaman hias 4.000 batang, benih hasil pemurnian cabai 250 gram dan tomat 250 gram, benih stroberi 1.000 batang, benih anggur 10 batang	465.000		edibel 4.300 botol, bibit tanaman buah 3.000 batang, bibit tanaman hias 1.200 batang.		edibel 4.300 botol, bibit tanaman buah 4.000 batang, bibit tanaman hias 1.200 batang.		jamur edibel 25.600 botol, bibit tanaman buah 19.000 batang, bibit tanaman hias 8.400 batang, benih hasil pemurnian cabai 250 gram dan tomat 250 gram. stroberi 1.000 batang, benih anggur 10 batang	1.278.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Produksi benih tanaman perkebunan	Produksi benih tanaman perkebunan	N/A	N/A	N/A	Penyediaan Bibit Unggul Perkebunan (Kakao 8.000 Btg dan Kelapa 4.000 btg)	385.000	Penyediaan Bibit Unggul Perkebunan (Kopi 150 batang, Kakao 8.000 Btg dan Kelapa 3.000 btg)	500.000	800	550.000	900	600.000	900	2.150.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY	
			Program Pengawasan dan sertifikasi benih pertanian	Jumlah sertifikasi benih Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	N/A	N/A	N/A	600	500.000	700	500.000	800	550.000	900	600.000	900	2.150.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				(hektar)															
			Kegiatan Sertifikasi perbenihan tanaman pertanian	Luas areal yang mengajukan sertifikasi untuk tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	N/A	N/A	N/A	600 ha	420.000	400 ha	420.000	430 ha	450.000	450 ha	475.000	1.880 ha	1.765.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Pengawasan Perbenihan Tanaman Pertanian	• Rekomendasi produsen dan pengedar benih	N/A	N/A	N/A	15 rekomendasi	80.000	15 rekomendasi	80.000	19 rekomendasi	100.000	23 rekomendasi	125.000	45 rekomendasi	385.000	10 rekomendasi	
			Program Perlindungan Tanaman Pertanian	Persentase pertanaman aman dari serangan OPT dan DPI (%)	N/A	N/A	N/A	95	500.000	95	500.000	95	520.000	95	550.000	95	2.070.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Pengendalian OPT Tanaman Pertanian	• Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan selama 1 tahun  • Berfungsinya laboratorium LPHPT	N/A	N/A	N/A	Padi 800 ha, jagung 75 ha, kedelai 30 ha, salak 25 ha, cabe 10 ha, bawang merah 5 ha, perkebunan 600 ha	310.000	Padi 120 ha, jagung 10 ha, kedelai 5 ha, salak 25 ha, cabe 3 ha, bawang merah 2 ha, perkebunan 60 ha	310.000	Padi 120 ha, jagung 10 ha, kedelai 5 ha, salak 25 ha, cabe 3 ha, bawang merah 2 ha, perkebunan 60 ha	320.000	Padi 120 ha, jagung 10 ha, kedelai 5 ha, salak 25 ha, cabe 3 ha, bawang merah 2 ha, perkebunan 60 ha	335.000	Padi 1.160 ha, jagung 105 ha, kedelai 45 ha, salak 100 ha, cabe 19 ha, bawang merah 11 ha, perkebunan 780 ha	1.275.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembuatan agen hayati (untuk TPH dan Perkebunan)</li> </ul>	N/A	N/A	N/A	10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis		10 jenis			
			Penyediaan Data dan Informasi Perlindungan Tanaman Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berfungsinya laboratorium LPMT</li> <li>Dokumen data, informasi peramatan serangan OPT dan DPI sebagai dasar rekomendasi pengendalian OPT dan DPI</li> <li>Laporan pengawasan peredaran penggunaan pestisida tingkat petani</li> <li>Rekomendasi tingkat Residu pada produk dan efektifitas bahan aktif pestisida</li> </ul>	N/A	N/A	N/A	1 tahun	190.000	1 tahun	190.000	1 tahun	200.000	1 tahun	215.000	1 tahun	795.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
			Program Pengembangan Perbibitan Ternak dan Diagnostik Kehewanan	Persentase bibit ternak bersertifikat yang terdistribusi (%)	N/A	N/A	N/A	92	4.500.000	94	4.700.000	96	4.800.000	98	4.900.000	98	18.900.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Produksi Bibit Ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produksi bibit ternak (ekor) besertifikat SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)</li> </ul>	N/A	N/A	N/A	50 ekor	3.600.000	50 ekor	3.782.000	50 ekor	3.862.000	50 ekor	3.943.000	200 ekor	15.187.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produksi semen beku (dosis) yang bersertifikat LSPro</li> <li>• Produksi HMT rata-rata pertahun untuk ternak di UPTD</li> </ul>	N/A	N/A	N/A	28.000 dosis		24.000 dosis		24.000 dosis		24.000 dosis		100.000 dosis			
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi Produk Asal Hewan dan Penyakit Hewan</li> <li>• Sertifikat Akreditasi Laboratorium</li> <li>• Hasil uji sampel produk asal hewan, penyakit hewan</li> </ul>	N/A	N/A	N/A	2 rekomendasi	900.000	-	918.000	-	938.000	-	957.000	2 rekomendasi	3.713.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
					N/A	N/A	N/A	2 lab		2 lab		2 lab		2 lab	2 lab				
					N/A	N/A	N/A	N/A		400 sampel, 6.300 sampel		400 sampel, 6.300 sampel		400 sampel, 6.300 sampel	400 sampel, 18.900 sampel				
Meningkatnya kualitas ketahanan pangan masyarakat	Terwujudnya ketahanan pangan		Program Peningkatan Ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan	Persentase peningkatan ketersediaan dan konsumsi energi	N/A	N/A	N/A	0,08	2.000.000	0,08	2.300.000	0,08	2.400.000	0,08	2.500.000	0,08	9.200.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan	Sertifikat dan Register PSAT (Pangan Segar Asal Tanaman)	N/A	N/A	N/A	6 dokumen	229.000	3 dokumen	345.000	4 dokumen	375.000	4 dokumen	400.000	17 dokumen	1.349.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
				Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	N/A	N/A	N/A	94,5%		95,0%		96,3%		97%	97%				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Kegiatan Gerakan Pengankaragaman Pangan	Gerakan pengankaragaman pangan	N/A	N/A	N/A	35 lokasi	554.000	15 lokasi	665.000	15 lokasi	680.000	15 lokasi	705.000	80 lokasi	2.604.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Penyediaan Cadangan Pangan	Laporan ketersediaan pangan berdasarkan prognosa, ARAM I, ARAM II, HBKN (Menjelang Puasa, Idul Fitri, Natal/Tahun Baru)	N/A	N/A	N/A	6 dokumen	577.000	6 dokumen	515.000	6 dokumen	495.000	6 dokumen	495.000	6 dokumen	2.082.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
				Pemanfaatan lahan di bawah tegakan	N/A	N/A	N/A	3 ha		-		-		-		3 ha			
				Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan masyarakat	631,1	N/A	N/A	40 ton		10 ton		8,5 ton		8,5 ton		698,1 ton			
			Kegiatan Distribusi Pangan Masyarakat	Laporan distribusi dan harga pangan serta informasi pasokan dan akses pangan	N/A	N/A	N/A	2 jenis data	540.000	-	630.000	2 jenis data	690.000	2 jenis data	725.000	2 jenis data	2.585.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
				LDPM Pra Penumbuhan	N/A	N/A	N/A	2 gapoktan		-		-		-		2 gapoktan			
				PUPM Penumbuhan	N/A	N/A	N/A	2 unit		-		-		-		2 unit			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Promosi pertanian dan ketahanan pangan Operasional TTIC	N/A	N/A	N/A	-		2 kali		2 kali		2 kali		6 kali			
				Operasional TTIC	N/A	N/A	N/A	-		1 tahun		1 tahun		1 tahun		3 tahun			
			Kegiatan Penyelenggaraan Jogja Benih	Data informasi perbenihan dan layanan konsultasi	N/A	N/A	N/A	1 tahun	100.000	1 tahun	145.000	1 tahun	160.000	1 tahun	175.000	4 tahun	580.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
				Jaringan pasar perbenihan, kerjasama dengan sumber benih dan calon buyer	N/A	N/A	N/A	-		1 kali		1 kali		1 kali		3 kali			
	Pemenuhan masyarakat		Program Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan	Jumlah desa rawan pangan (desa)	10	N/A	N/A	6	900.000	4	1.100.000	2	1.200.000	0	1.500.000	0	4.700.000	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	DIY
			Kegiatan Analisis Data Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Laporan analisis situasi pangan dan gizi	N/A	N/A	N/A	1 dokumen	80.000	1 dokumen	100.000	1 dokumen	120.000	1 dokumen	150.000	4 dokumen	450.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
				Laporan ketahanan dan kerentanan pangan	N/A	N/A	N/A	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
			Kegiatan Penanganan Desa Rawan Pangan	Desa Mandiri Pangan	N/A	N/A	N/A	Hibah 8 desa Pendampingan 8 desa	820.000	Hibah 4 desa Pendampingan 4 desa	1.000.000	Hibah 4 desa Pendampingan 4 desa	1.080.000	Hibah 4 desa Pendampingan 4 desa	1.350.000	Hibah 20 desa Pendampingan 20 desa	4.250.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)	target			Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) penumbuhan Rekomendasi kebijakan ketahanan pangan	N/A	N/A	N/A	2 gapoktan		2 gapoktan		2 gapoktan		2 gapoktan		8 gapoktan			
					N/A	N/A	N/A	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		4 dokumen			
<b>DANA KEISTIMEWAAN</b>																			
	Meningkatnya pengelolaan pelestarian budaya*		Program Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya*	Persentase peningkatan potensi kearifan lokal dan budaya daerah yang berdaya saing	0,05	0,06	22.330.000	0,08	26.796.000	0,10	32.155.200	0,13	38.586.240	0,15	46.303.488	0,15	46.303.488	Dinas Kebudayaan	DIY
			Kegiatan Pengembangan Lumbung Mataraman*	Jumlah Lumbung Mataraman yang dibina	Tahap penumbuhan 5 lokasi	N/A	N/A	Tahap penumbuhan 20 lokasi	1.100.000	Tahap penumbuhan 20 lokasi	4.950.000	Tahap penumbuhan 25 lokasi	6.500.000	Tahap penumbuhan 25 lokasi	9.000.000	Tahap penumbuhan 90 lokasi	21.550.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	DIY
						N/A	N/A	Tahap pengembangan 10 lokasi		Tahap pengembangan 20 lokasi		Tahap pengembangan 20 lokasi		Tahap pengembangan 25 lokasi		Tahap pengembangan 75 lokasi			
								Tahap kemandirian 5 lokasi		Tahap kemandirian 10 lokasi		Tahap kemandirian 20 lokasi		Tahap kemandirian 20 lokasi		Tahap kemandirian 55 lokasi			
				Budidaya tanaman di lahan surjan		N/A	N/A	N/A	-	6 kelompok		8 kelompok		8 kelompok	24 kelompok				
				Gumregah Tani Mataraman		N/A	N/A	N/A	-	1 kali		-		1 kali		2 kali			
				Budidaya Tanaman Sistem		N/A	N/A	N/A	-	5 kelompok		3 kelompok		3 kelompok		11 kelompok			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						target	Rp (000)	target	Rp (000)	Target	Rp (000)	target	Rp (000)	target	Rp (000)			target	Rp (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Sabuk Gunung															
				Pelestarian tanaman varietas lokal	N/A	N/A	N/A	-		7 komoditas		4 komoditas		4 komoditas		15 komoditas			
				Branding kopi khas Jogja	N/A	N/A	N/A	-		-		1 lokasi		1 lokasi		2 lokasi			
				Pengembangan ternak lokal	N/A	N/A	N/A	-		-		1 jenis		1 jenis		2 jenis			
				Lantip Trengginas	N/A	N/A	N/A	-		-		1 kali		1 kali		2 kali			
				Pengendalian OPT berbasis kearifan lokal	N/A	N/A	N/A	-		-		1 kawasan		2 kawasan		3 kawasan			

\* Tujuan, Sasaran, dan Program Dana Keistimewaan melekat pada Dinas Kebudayaan DIY, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagai KPA dengan 1 (satu) kegiatan

## BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1 2018	Tahun 2 2019	Tahun 3 2020	Tahun 4 2021	Tahun 5 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam PDRB (Juta rupiah) <i>(Sumber BPS)</i>	6.903.079	N/A	7.112.249	7.183.372	7.255.205	7.327.757	7.327.757
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	88,5	N/A	90,22	90,52	90,82	91,12	91,12
3	Persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan (%)	40,52	N/A	40,29	39,74	39,19	38,65	38,65

## BAB 8 PENUTUP

Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 5 (lima) tahun mendatang dan mengacu RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, diperlukan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra Tahun 2017-2022 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dengan Pelaksana Harian pada Kepala Bidang dan jajarannya;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan dibantu oleh Sekretaris Dinas;
3. Seluruh Bidang/UPTD yang ada di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY agar melaksanakan program-program dalam Renstra Tahun 2017-2022 dengan sebaik-baiknya;
4. Penjabaran lebih lanjut Renstra Tahun 2017-2022 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY;
5. Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY harus menjadi acuan bagi setiap Bidang/UPTD dalam menyusun Rencana Kerja yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai;
6. Agar Renstra Tahun 2017-2022 dapat dilaksanakan dan memberikan hasil yang diharapkan, maka setiap SKPD perlu mengupayakan penguatan peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022, di samping itu ditempuh melalui proses sosialisasi, baik kepada seluruh komponen aparat yang ada di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, instansi terkait maupun masyarakat luas;
7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2017-2022, dipandang perlu untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap capaian target sasaran, sebagai berikut:
  - a. Pengendalian pelaksanaan rencana program dan kegiatan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Bidang/UPTD;
  - b. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana program dan kegiatan dari masing-masing Pimpinan Bidang/UPTD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

- c. Kepala Bidang/UPTD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya;
  - d. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY menyusun evaluasi program dan kegiatan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Bidang/UPTD sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
  - e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja untuk periode berikutnya.
8. Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2017-2022 dihadapkan pada hal-hal di luar kendali Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, maka konsepsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada Pemerintah DIY untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

Jl. Gondosuli Nomor. 6 Telp(0274) 588938, 561030 Fax (0274) 561030

Website: <http://dppk.jogjaprovo.go.id> Email: [dppk@jogjaprovo.go.id](mailto:dppk@jogjaprovo.go.id)

Y O G Y A K A R T A 5 5 1 6 5

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Nomor : 05288 Tahun 2019**

**TENTANG  
PENUNJUKKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
2017-2022**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa agar pembangunan pertanian dapat dilaksanakan setiap tahun secara terpadu dan tepat sasaran, dibutuhkan dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;
- b. bahwa untuk membuat dokumen Rencana Strategis Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2017-2022 perlu dibentuk tim penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2017-2022;
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Rencana Strategis Perangkat Daerah 2017-2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009;
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022;
18. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Rencana Strategis Perangkat Daerah 2017-2022.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Penunjukkan Tim Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2017-2022.

- KEDUA : Menunjuk nama-nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini duduk sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
- KETIGA : Tugas dan kewajiban Tim Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2017-2022 adalah menyusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Tahun 2017-2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 18 April 2019

**KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Ir. SASONGKO, M.Si  
NIP.19591216 198603 1 007**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Bappeda DIY;
2. Kepala BPKA DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Pelaksana Tim yang bersangkutan;
5. Peringgal.

**Untuk diketahui dan atau dipergunakan  
sebagaimana mestinya**

**Lampiran 1.**

Keputusan Kepala Dinas Pertanian  
dan Ketahanan Pangan  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 05288 Tahun 2019  
Tanggal : 18 April 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY  
2017-2022**

<b>No</b>	<b>Kedudukan</b>	<b>Nama/Jabatan</b>	<b>Keterangan Instansi</b>
1	Ketua	Ir. Sasongko, M.Si.	Kepala DPKP DIY
2	Wakil	Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A	Wakil DPKP DIY
3	Sekretaris	Ir. Valentinus Barudin, M.Si	Sekretaris DPKP DIY
4	Anggota	1. Ir. Yektining Rahajeng, M.P 2. Ir. Suparjiyem, M.P 3. Ir. Ika Hartati, M.Si 4. drh. Kurnia Tejawati  5. R. Bambang Dwi Witjaksono, S.P., M.E 6. Ir. Suharto Budiyono 7. Ir. Sutarno 8. Ir. Maman Suherman, MP 9. Titi Purwati, SH. MM. 10. Yosephine Retno Astuti, S.T.P., M.Ec.Dev	Kepala Bidang Tanaman Pangan Kepala Bidang Hortikultura Kepala Bidang Perkebunan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kepala Bidang Ketahanan Pangan  Kepala UPTD BPPMBTP Kepala UPTD BPTDK Kepala UPTD BPTP Kepala UPTD BPSDMP Kepala Subbag Program

**KEPALA DINAS PERTANIAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**Ir. SASONGKO, M.Si  
NIP.19591216 198603 1 007**

**Formulir E.27**  
 Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan  
 Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
 Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah provinsi dan Agenda Kerja	V			
2	Penyiapan data dan informasi	V			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah provinsi	V			
4	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi	V			
5	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi	V			
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah provinsi	V			
7	Perumusan isu-isu strategis	V			
8	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi		V	Sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah tidak menyusun Visi Misi Perangkat Daerah, namun penyusunan Renstra sudah mempedomani Visi Misi RPJMD	
9	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah		V		
10	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	V			
11	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi	V			
12	Mempelajari Surat Edaran Gubernur perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah provinsi beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah provinsi	V			
13	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah provinsi guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi	V			
14	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	V			
15	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi	V			
16	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah provinsi	V			
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah provinsi berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah	V			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah provinsi	V			
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah provinsi sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi.	V			
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah disahkan	V			

Yogyakarta, tanggal 14 Juni 2019  
 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



**Ir. Sasongko, M.Si**  
 NIP. 19591216 198603 1 007

TUJUAN PERANGKAT DAERAH
Tumbuhnya perkembangan sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan di DIY
Indikator pencapaian pengembangan nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB dari tahun 2017 ke tahun 2022 sebesar 6,15%

SASARAN PERANGKAT DAERAH								
SASARAN 1								
Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan								
INDIKATOR SASARAN	META INDIKATOR (formulas indikator)	Satuan	Baseline	2018	2019	2020	2021	2022
Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB dari tahun 2017 ke tahun 2022 sebesar 6,15%	Nilai sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam PDRB tahun t (ASPK)	Juta rupiah	6.900,079	7.041,831	7.112,249	7.183,172	7.255,205	7.327,717

PROGRAM PERANGKAT DAERAH									
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR (formulas indikator)	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan (ton)	Produk dari satuan ton (produk ton) = luas panen (ha) x produktivitas (ton/ha) dan meningkatkan hasil produk 10 komoditas tanaman pangan selama 1 tahun	ton	2.204,717	2.209,799	2.312,780	2.311,050	2.313,255	2.321,500

KEGIATAN PERANGKAT DAERAH									
Kegiatan 1									
Budidaya Tanaman Pangan									
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran (Rp)	
Meningkatnya produktivitas tanaman pangan	Draft Raperogin Teknik Lantai Perda No. 10 tahun 2013 tentang UPR	Raperogin/Perkebun	-	1	1	1	1	-	
	Luas lahan yang produktivitasnya meningkat	Hektar	-	100	60	60	60	60	
	Sarana prasarana lahan air yang dapat berfungsi dengan baik	Km	-	4	2	2	2	-	
	Sarana pertanian yang dapat dipertah	Unit	-	60	36	18	18	-	
			-	2.500.000.000	5.400.000.000	2.800.000.000	2.985.000.000	-	

PROGRAM 2									
Program Peningkatan Produksi Hortikultura									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR (formulas indikator)	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya produksi tanaman hortikultura	Produksi hortikultura (ton)	Jumlah produksi tanaman hortikultura dengan cara mengolah produk dalam satuan ton (produk ton) = luas panen (ha) x produktivitas (ton/ha) dan meningkatkan hasil produk komoditas hortikultura (Sayuran Buah Semusim (SBS), Buah Sayuran Tahunan (BST), Tanaman Hias (TH), Tanaman Bio Farmaka (TBF) selama 1 tahun	ton	392,421	396,375	397,965	399,550	401,150	402,750

Kegiatan 2									
Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaan Hasil Tanaman Pangan									
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran (Rp)	
Meningkatnya jumlah tanaman pangan yang mendapatkan sertifikat	Jumlah sertifikat jaminan mutu hasil tanaman pangan	Sertifikat	-	1	-	-	-	-	
	Ketersediaan informasi harga komoditas tanaman pangan (Beras, Jagung, kedelai, ubi-ubi, kacang hijau)	Komoditas	-	-	3	3	3	-	
	Dokumen pemetaan organik komoditas tanaman pangan	Dokumen	-	-	1	1	1	-	
			-	80.000.000	100.000.000	110.000.000	115.000.000	-	

PROGRAM 3									
Program Peningkatan Populasi Peternakan									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR (formulas indikator)	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya populasi ternak	Populasi ternak (ekor/Unit)	Pengukuran indikator dengan cara menghitung populasi ternak dalam satuan Animal Unit (AU) dimana populasi (AU) = jumlah populasi ternak (ekor) x satuan konversi (AKN) dan meningkatkan populasi ternak besar, ternak kecil dan unggas pada periode tertentu (akhir tahun)	Animal Unit (AU)	620,555	620,869	622,242	624,874	626,885	628,870

Kegiatan 3									
Operasional Agribiotech Park (ATP)									
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran (Rp)	
Beroperasinya Agribiotech Park (ATP)	Operasional ATP	Tahun	-	1	1	1	1	-	
	Pembangunan fisik ATP	Tahun	-	1	1	1	1	-	
	Soft launch	Kali	-	1	1	1	1	-	
			-	8.420.000.000	2.000.000.000	841.000.000	991.000.000	-	

PROGRAM 4									
Program Peningkatan Produk Perkebunan									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR (formulas indikator)	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya produksi perkebunan	Produk perkebunan (ton)	Produk komoditas unggulan perkebunan tahun t (Biji, kacang, kelapa, mete, tembakau, teh, dan kopi)	Ton	68.027,97	68.740	68.877	69.015	69.151	69.290

Kegiatan 1									
Budidaya Hortikultura									
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran (Rp)	
Meningkatnya produktivitas hortikultura	Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya hortikultura	Ha	-	231	176	203	153	-	
	Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya hidroponik	Ha	-	-	3	3	2	-	
	Luas lahan yang diusahakan untuk budidaya organik	Ha	-	-	2	2	1	-	
	Jumlah kebun yang terregistrasi dan terakreditasi	Sertifikat	-	250	250	285	215	-	
	Pemeliharaan Obor Pangan Lestari (OPAL)	Unit	-	-	1	1	1	-	
			-	2.700.000.000	2.900.000.000	3.355.000.000	2.537.000.000	-	

Kegiatan 2									
Standarisasi Mutu Produk Pertanian dan Pemasaan Hasil Hortikultura									
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran (Rp)	
Meningkatnya jumlah komoditas hortikultura yang mendapatkan sertifikat	Jumlah sertifikat mutu hortikultura	Dokumen	-	1	1	1	1	-	
	Ketersediaan informasi harga komoditas hortikultura (lobak, bawang merah, bawang putih, tomat)	Komoditas	-	-	4	4	4	-	
			-	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	

PROGRAM 5									
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR (formulas indikator)	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas SDM petani/pertanian	Tingkat pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian	Nilai rata-rata persentase hasil evaluasi pasci dilak pada tahun t	Nilai/Skor	71	n/a	73	74	75	76

Kegiatan 1									
Budidaya Peternakan									
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran (Rp)	
Meningkatnya produktivitas peternakan	Pemeliharaan populasi ternak unggas (ayam/ka)	Ekor	-	130	66	87	65	-	
	Pemeliharaan populasi ternak kecil (kambing/domba)	Ekor	-	144 Bilgon, 24 PE	27 Bilgon, 5 PE	71 Bilgon, 13 PE	27 Bilgon, 5 PE	-	
	Pemeliharaan populasi ternak besar (sapi perah/botong)	Ekor	-	120	23	30	21	-	
	Jumlah barang atau sarana prasarana dukungan terhadap optimalisasi produksi produk komoditas perkebunan (Bahan (B) dengan single Service per Conception (SC) sebesar 2 kali buah)		-	N2 car 2.000 liter, semen betu 5.500 dosis, plaskh sheet 15.000 buah dan plaskh gloves 10.000 buah	N2 car 380 liter, semen betu 1.140 dosis, plaskh sheet 1.140 buah dan plaskh gloves 2.280 buah	N2 car 760 liter, semen betu 2.280 dosis, plaskh sheet 2.280 buah dan plaskh gloves 4.560 buah	N2 car 380 liter, semen betu 1.140 dosis, plaskh sheet 1.140 buah dan plaskh gloves 2.280 buah	-	
	Pemeliharaan populasi ternak ayam betis	Ekor	-	-	1.000	1.000	900	-	
	Pengembangan pakan lengkap peternakan	Kelompok	-	-	12	10	10	-	
			-	2.800.000.000	2.800.000.000	3.850.000.000	2.875.000.000	-	

Kegiatan 2									
Peningkatan dan Pemeliharaan Penyakit Hewan									
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran (Rp)	
Peningkatan mutu peternakan	Jumlah ternak yang divaksinasi	ekor	-	1.250	1.250	1.500	1.250	-	
	Pengamanan hewan ternak melalui Pet Laku Ternak (PLT)	Lokasi	-	5	7	7	7	-	
			-	200.000.000	200.000.000	225.000.000	200.000.000	-	

Kegiatan 3									
Pengamanan Produk Pangan Asal Hewan									
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran (Rp)	
Meningkatnya jumlah peternakan peternakan yang mendapatkan sertifikat	Jumlah ternak yang diusahakan pada pelaksanaan audit HVS peternakan yang sesuai produk asal hewan yang telah memenuhi persyaratan	Sertifikat	-	-	1	1	1	-	
	Ketersediaan informasi harga komoditas peternakan (dagang sapi, daging kambing, daging ayam, telur)	Komoditas	-	-	4	4	4	-	
			-	-	110.000.000	125.000.000	125.000.000	-	

PROGRAM 6									
Program Peningkatan Produk Perikanan									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR (formulas indikator)	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya produksi perikanan	Produk perikanan (ton)	Produk komoditas unggulan perikanan tahun t (Biji, kacang, kelapa, mete, tembakau, teh, dan kopi)	Ton	68.027,97	68.740	68.877	69.015	69.151	69.290

Kegiatan 1									
Budidaya Perkebunan									
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran (Rp)	
Meningkatnya produktivitas perkebunan	Budidaya tanaman perkebunan 4 komoditas (Biji, kacang, kelapa, mete)	orang	-	100 orang (22 hektar)	200 orang (100 hektar)	300 orang (200 hektar)	200 orang (210 hektar)	-	
	Pemeliharaan tanaman perkebunan 3 komoditas (Biji, kacang, dan kelapa)	orang	-	255 orang (57 ha)	100 orang (110 ha)	150 orang (170 ha)	110 orang (122 ha)	-	
			-	800.000.000	900.000.000	1.382.000.000	1.000.000.000	-	

Kegiatan 2									
Peningkatan dan Pemasaan Hasil Tanaman Perkebunan									
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran (Rp)	
Meningkatnya jumlah komoditas perkebunan yang mendapatkan sertifikat	Benih pengujian pasca panen	orang	-	270 orang (87,5 ha)	100 orang (20 ha)	180 orang (22 ha)	115 orang (21,5 ha)	-	
	Sertifikasi mutu produk perkebunan	kelompok	-	3 kelompok (22,5 ha)	3 kelompok (22,5 ha)	4 kelompok (25 ha)	3 kelompok (25 ha)	-	
	Pengaliran lahan dan air 2 komoditas (dopi dan kakao)	orang	-	60 orang (15 hektar)	50 orang (15 hektar)	60 orang (16,5 hektar)	60 orang (18 hektar)	-	
	Penerapan standar mutu hasil perkebunan	Komoditas	-	-	2	2	2	-	
	Tempu kembangan peternakan perkebunan	kelompok	-	2	2	2	2	-	
	Tempu kembangan peternakan perkebunan	kelompok	-	100 orang (25 ha)	40 orang (15,25 ha)	40 orang (15,25 ha)	50 orang (15 ha)	-	
			-	600.000.000	450.000.000	500.000.000	511.000.000	-	

Kegiatan 3									
Budidaya Tanaman Tembakau (Cukai)									
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran (Rp)	
Meningkatnya produktivitas tanaman tembakau	Budidaya tanaman tembakau sesuai GAP	orang	-	50 orang (15 ha)	60 orang (18 ha)	80 orang (24 ha)	60 orang (18 ha)	-	
	Pengaliran hama terpadu komoditas tembakau dengan sistem jekason lapang	orang	-	50 orang (15 ha)	70 orang (21 ha)	100 orang (30 ha)	70 orang (21 ha)	-	
	Bimbingan teknis pengolahan gajaca	orang	-	50 orang (15 ha)	50 orang (15 ha)	60 orang (18 ha)	50 orang (15 ha)	-	
	Bimbingan teknis pengolahan lahan gan	orang	-	50 orang (15 ha)	80 orang (24 ha)	100 orang (30 ha)	80 orang (24 ha)	-	
	Uji kadar Tar dan Nikotin tanaman tembakau di 3 kabupaten	kelompok	-	3 kelompok (20 ha)	3 kelompok (30 ha)	4 kelompok (27 ha)	3 kelompok (20 ha)	-	
			-	450.000.000	550.000.000	750.000.000	550.000.000	-	

Kegiatan 4									
Kembangkan Petani Tembakau (Cukai)									
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran (Rp)	
Meningkatnya kapasitas kelompok petani tembakau	Bimbingan teknis kelompok usaha petani tembakau	orang	-	60 orang (15 ha)	30 orang (7,5 ha)	110 orang (28 ha)	30 orang (7,5 ha)	-	
	Tempu kembangan peternakan tembakau	Ha	-	30	7,5	9	7,5	-	
			-	550.000.000	400.000.000	500.000.000	400.000.000	-	

PROGRAM 7									
Program Pengembangan SDM Pertanian dan Penyuluhan									
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	META INDIKATOR (formulas indikator)	SATUAN	Baseline (2016/2017)	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas SDM petani/pertanian	Tingkat pengetahuan dan keterampilan SDM pertanian	Nilai rata-rata persentase hasil evaluasi pasci dilak pada tahun t	Nilai/Skor	71	n/a	73	74	75	76

Kegiatan 1									
Nataliahin SDM Pertanian									
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran (Rp)	
Meningkatnya kapasitas SDM pertanian	Pelatihan teknis tanaman pangan	orang	-	Terlatihnya teknis pertanian tanaman pangan bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik) 90 orang	Terlatihnya teknis pertanian tanaman pangan bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80 orang	Terlatihnya teknis pertanian tanaman pangan bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80 orang	Terlatihnya teknis pertanian tanaman pangan bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80 orang	Terlatihnya teknis pertanian tanaman pangan bagi petani dan petugas yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80 orang	-
	Pelatihan teknis hortikultura	orang	-	Terlatihnya teknis pertanian hortikultura bagi petani dan petugas sebanyak 90 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	Terlatihnya teknis pertanian hortikultura bagi petani dan petugas sebanyak 60 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	Terlatihnya teknis pertanian hortikultura bagi petani dan petugas sebanyak 120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	Terlatihnya teknis pertanian hortikultura bagi petani dan petugas sebanyak 120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	Terlatihnya teknis pertanian hortikultura bagi petani dan petugas sebanyak 120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	-
	Pelatihan teknis peternakan	orang	-	Terlatihnya teknis pertanian peternakan hortikultura bagi petani dan petugas sebanyak 90 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	Terlatihnya teknis pertanian peternakan hortikultura bagi petani dan petugas sebanyak 120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	Terlatihnya teknis pertanian peternakan hortikultura bagi petani dan petugas sebanyak 120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	Terlatihnya teknis pertanian peternakan hortikultura bagi petani dan petugas sebanyak 120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	Terlatihnya teknis pertanian peternakan hortikultura bagi petani dan petugas sebanyak 120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	-
	Pelatihan teknis perikanan	orang	-	Terlatihnya teknis pertanian perikanan hortikultura bagi petani dan petugas sebanyak 90 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	Terlatihnya teknis pertanian perikanan hortikultura bagi petani dan petugas sebanyak 60 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	Terlatihnya teknis pertanian perikanan hortikultura bagi petani dan petugas sebanyak 120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	Terlatihnya teknis pertanian perikanan hortikultura bagi petani dan petugas sebanyak 120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	Terlatihnya teknis pertanian perikanan hortikultura bagi petani dan petugas sebanyak 120 orang yang lulus dengan nilai 75 (baik) 80%	-
			-	800.000.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000	-	

Kegiatan 2									
Peningkatan Penyuluhan Pertanian									
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran (Rp)	
Meningkatnya prestasi kerja penyuluhan PNS dan TN TPP	Program penyuluhan	Tahun	-	1	1	1	1	-	
	Pemilihan kelas kelompok	Dokumen	-	1	1	1	1	-	
	Tempu								



